

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROV. KALTIM TAHUN 2025-2029



#DINSOS KALTIM
SELALU ADA

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sebagai dasar Dokumen Perencanaan dan acuan Penganggaran untuk periode 5 (Lima) Tahun kedepan. Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial hingga saat ini, selain itu Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 merupakan Dasar dan Pedoman bagi semua Jajaran di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial secara Sinergis dan Berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen yang Dinamis, yaitu Dokumen yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan Kondisi dan Situasi Masyarakatnya. Masyarakat yang dinamis akan memunculkan Rencana-rencana Pembangunan dan Kebijakan serta Sasaran-sasaran yang berupaya Mempertajam Tujuannya yaitu Kesejahteraan Rakyat.

Demikian pula dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2025-2029 mengalami review yang diarahkan untuk keselarasan dan lebih mempertajam Sasaran dan Target Penanganan yang menjadi Tujuan Pelaksanaan yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh Jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur kami berharap agar seluruh target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diimplementasikan.

Serta dalam rangka ikut mensukseskan Program Pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan Sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Samarinda, November 2025



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pambina Utama Madya / IV d

NIP. 19680814 199403 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	8
2.2. Sumberdaya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun	17
2.4. Kelompok Sasaran	26
2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	27
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Cascading Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	41
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	66
3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	68
BAB. IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	71
BAB. V. PENUTUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Sosial Prov. Kaltim ...	16
2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim	17
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	19
2.4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinsos Prov. Kaltim .	22
2.5	Hasil evaluasi SPM dan IKK	24
2.6	Anggaran dan Ralisasi Pendanaan Dinsos Prov. Kaltim ...	25
2.7	Kelompok Sasaran Dinsos Prov. Kaltim	26
2.8	Identifikasi Permasalahan Tiap Bidang Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	32
2.9	Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
2.10	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	36
2.11	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	37
2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Prov. Kaltim	39
3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim	44
3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Prov. Kaltim	46
3.3	Cascading Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	47
3.4	Penahapan Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim	68
3.5	Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	69

Tabel		Halaman
3.6	Tujuan, Sasaran & Strategi Dinsos Prov. Kaltim	69
3.7	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Sosial Prov. Kaltim	70
4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	74
4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	102
4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	123
4.5	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	124
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Organisasi	9
3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinsos	42
3.2	Pohon Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim	63
4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekadar berapa Jumlah dan Persentase Penduduk berkaitan dengan Miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan Keparahan dari Kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah Penduduk Miskin, kebijakan Pengentasan Kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.

Adapun kondisi Umum terkait Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 5,17 persen, menurun 0,34 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,61 persen poin terhadap Maret 2024;
2. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 199,71 ribu orang, menurun 12,2 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 21,63 ribu orang terhadap Maret 2024;
3. Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp866.193/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp611.584 (70,61 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp254.609 (29,39 persen);
4. Pada Maret 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5,24 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp4.538.851/rumah tangga/bulan.

Semakin jauh dari angka nol, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Selain persoalan kemiskinan, pelayanan dasar melalui pemenuhan kebutuhan dasar menjadi Urusan Wajib yang harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat yang ditentukan melalui Standar pelayanan Minimal (SPM) .

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Berdasarkan instruksi Mendagri no 2/2025, Indikator Kesejahteraan Sosial (IKESOS) sudah dijadikan indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Ikesos merupakan upaya pengukuran kinerja urusan sosial dan Ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Ketika demokrasi merupakan prasyarat menuju sejahtera, maka ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses dan pelayanan yg sama sesuai kebutuhannya, oleh sebab itu maka sangat diperlukan penyusunan perhitungan Ikesos oleh Daerah sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanganan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nmr);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk menyediakan panduan perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dalam Aspek Sumber Daya Manusia 1 (satu) yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;

2. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2025-2029;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Rencana Kerja Tahunan).
4. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik Tahunan maupun 5 (Lima) Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029, ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen lainnya.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMSALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PROV. KALTIM

BAB ini menguraikan tentang kondisi Internal, Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan serta Tugas dan Fungsi Dinas serta Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini menguraikan dan mengidentifikasi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

BAB ini menguraikan tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Target keberhasilan pencapaian melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

BAB ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansional, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Bidang Sosial.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani Permasalahan Sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

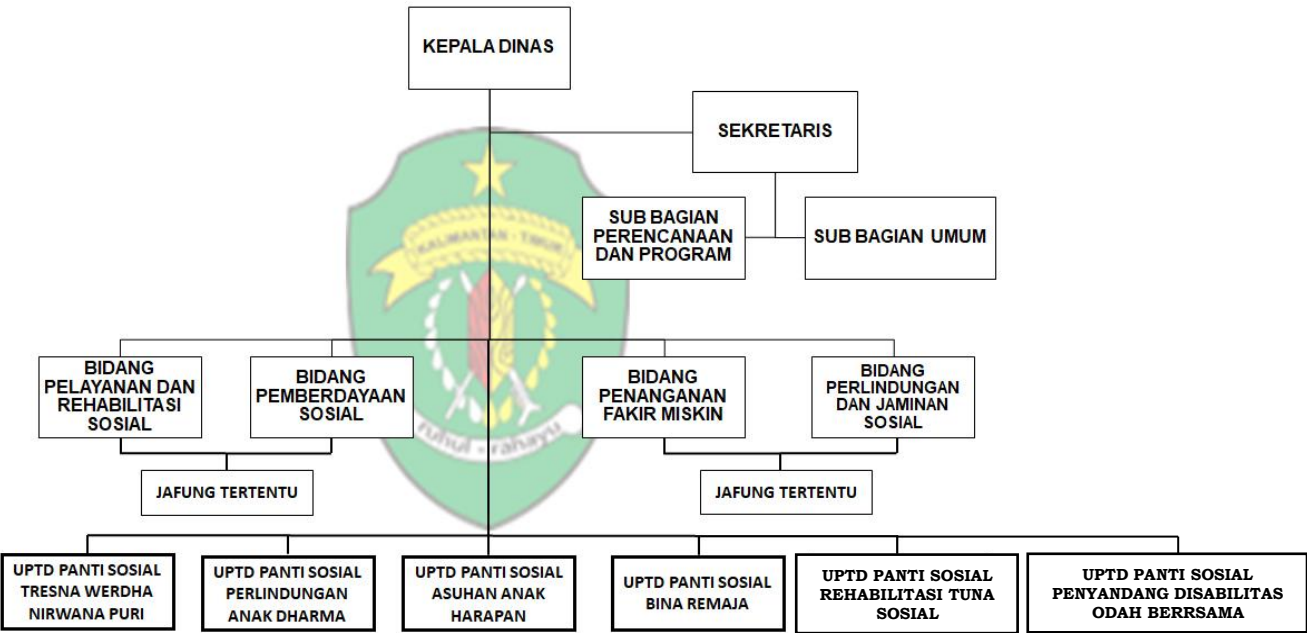
- a. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Timur;
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanganan, Pemberdayaan PMKS;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang Ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional Tertentu Seperti yang digambarkan pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Adapun yang menjadi uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:

- Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan Serta Pengaduan Masyarakat;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi Keuangan;
- Pelaksanaan Tugas Lainnya yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

B. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Pemberdayaan Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- Penyiapan Bahan-Bahan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

C. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Kesejahteraan Anak;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan

pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pencegahan Dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- Penyiapan Bahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

E. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanganan Fakir Miskin;

- c. Memverifikasi dan Memvalidasi Data Calon Penerima Bantuan Program Penanganan Fakir Miskin di Perkotaan, Pedesaan Serta Daerah Pesisir dan Pulau Terluar.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 6 (lima) unit yang dibentuk masing-masing sebagai berikut:

1. UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI (UPTD PSTW-NP)

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar.
- Daya Tampung 126 Orang.

2. UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (UPTD PSPAD).

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dalam pola Perlindungan dan Penyantunan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Anak;
- Daya tampung 80 anak.

3. UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (UPTD PSAAH).

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- Daya tampung 100 anak.

4. UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR).

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Remaja Terlantar;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Remaja Terlantar;
- Daya Tampung Sebanyak 105 Orang.

5. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS).

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
- Sasaran adalah Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Sosial Lainnya
- Daya Tampung 40 Orang.

6. UPTD PANTI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (PSPD).

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar;
- Pembangunan Gedung UPTD sedang dalam tahap penyelesaian
- Daya Tampung sementara 80 Orang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD adalah Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Tenaga Perawat.

- Pekerja Sosial : 20 Orang
- Penyuluh Sosial : 7 Orang
- Perawat : 1 Orang

2.2. SUMBERDAYA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Jumlah sumber daya manusia yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS) adalah sebanyak 150 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 194 orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Sosial Prov. Kaltim

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				PENDIDIKAN					
	PRIA	WANITA	IV	III	II	I	S2	S1	DIP L	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang dan Kepala Panti	6	3	9				7	2				
Kepala Seksi	11	4		1	14		1	14				
Fungsional / Staff PNS	84	40	4	53	60	7	4	28	9	71	8	4
Jumlah PNS	103	47	15	54	76	7	14	44	9	71	8	4
PPPK	118	76					2	87	14	87	3	5
Jumlah ASN	221	123	15	54	76	7	16	127	23	158	11	9
JUMLAH KESELURUAHAN	344		150				344					

2.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Sosial perlu ada Asset/Modal yang dimiliki, diantaranya asset Lahan/Tanah, Bangunan, Alat Mesin dan lain-lain.

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	3.328 M2
2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	22.85 M2
3	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	50.8 M2
4	UPTD Panti Sosial Anak Harapan	8.48 M2
5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	27.975 M2
6	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	20.5 M2
7	Listrik	4 Jaringan
8	Air	1 Jaringan
9	Telepon	3 Line (1 Fax)
10	Area Parkir	2 Area
11	Ruang Rapat	3 Ruang
12	Ruang Arsip	2 Ruang

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Sosial, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin guna memenuhi kebutuhan dasar PMKS.

Dalam Rencana Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Program indikator dari tiap-tiap kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin serta UPTD yang ada di lingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan timur, adapun Program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d. Program Rehabilitasi Sosial;
- e. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- f. Program Penanganan Bencana;
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya (2019-2024), sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun (%) ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	Terlaksananya pemberian bantuan UEP bagi Keluarga Miskin	400	400	400	400	4,000	400	400	400	800	4,000	100	100	100	200	100
2	Penyediaan Bantuan Sosial Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Klien LKS / Panti Swasta	-	-	Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Klien LKS / Swasta	-	-	-	-	7,630	-	-	-	-	9,450	-	-	-	-	123.85
3	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia serta orang dengan ODHA / HIV/AIDS Luar Panti	-	-	Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia serta orang dengan ODHA / HIV/AIDS Luar Panti	808	808	808	552	-	808	808	808	552	-	100	100	100	100	-
4	Penyediaan dan Pemberian Bantuan serta Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana Alam dan Sosial wewenang Provinsi	100%	100%	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi Korban Pasca Bencana Alam dan Sosial	1,118	1,118	1,518	1,518	17,870	1,942	1,130	2,500	2,205	17,870	173.70	101.07	164.69	145.26	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun (%) ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Fasilitasi Manajemen usaha Bagi Keluarga Fakir Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	-	40	40	50	500	-	40	40	455	680	-	100	100	910	136
6	Jumlah Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (PSTWNP)	100%	100%	Terlaksananya PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	110	110	110	110	126	110	110	110	110	116	100	100	100	100	92.06
7	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAD)	100%	100%	Terlaksananya PMKS Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
8	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100%	100%	Terlaksananya PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun (%) ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	100%	100%	Terlaksananya peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	60	75	75	75	105	75	75	75	75	115	125	100	100	100	110
10	Jumlah Wanita Korban Kekerasan / trafficking dan PMKS Lainnya yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW)	100%	100%	Terlaksananya Wanita Korban Kekerasan / trafficking dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	30	35	35	35	35	30	35	35	83	154	100	100	100	237.14	440

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, pencapaian indikator kinerja banyak yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat tercapai pada akhir periode

2.3.2. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan yang terdapat pada RENSTRA Tahun 2025-2030.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini merupakan bagian dari RPJMD Kalimantan Timur. Pembanding capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada Tahun 2023.

Tabel. 2.4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinsos Prov. Kaltim

NO.	KOMPONAN YANG NILAI	BOBOT	NILAI 2020	NILAI 2021	NILAI 2022		NILAI 2023	NILAI 2024		Kenaikan/ Penurunan
					BOBOT	NILAI		BOBOT	NILAI	
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.07	24.29	30%	25.50	27.00	30%	26.60	(2.40)
2	Pengukuran Kinerja	25%	18.75	19.06	20%	14.20	15.40	30%	21.30	5.90
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.97	10.97	10%	5.90	5.90	15%	10.65	4.75
4	Evaluasi Kinerja	10%	5.70	5.70	20%	11.00	19.00	25%	19.00	-
5	Capaian Kinerja	20%	11.50	13.13	20%	14.80	14.80	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi		70,99	73,15		71,40	82.10		75.55	
	Kategori Penilaian		BB	BB		BB	A		BB	

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial Prov. Kaltim telah melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara berkala dan dilakukan per triwulan, adapun kegiatan adalah Pemantauan Rencana Aksi, Realisasi Kinerja dan Keuangan serta kendala yang dihadapi dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang bertujuan agar dokumen perencanaan kinerja dapat meningkat.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial Prov. Kaltim telah menyusun Pengukuran Kinerja yang berupa Rancangan Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi yang dibuat secara berjenjang dari level Esselon II sampai dengan staff, per triwulan dilakukan Evaluasi atau pemantauan baik Realisasi Kinerja maupun keuangan serta Kendala yang di hadapi pada Rencana Aksi atau RKT Pada tahun 2024 Dinas Sosial melakukan perubahan SOTK / Refocussing Organisasi sesuai dengan kinerja bidang dan UPTD.

c. Pelaporan Kinerja

Sebelum menjadi Laporan LkjIP Dinas Sosial Prov. Kaltim melakukan pengisian pada Matriks capaian kinerja per triwulan sehingga setelah triwulan ke IV maka akan di buat Laporan LkjIP. Pada Laporan ini juga akan di masukan perbandingan realisasi kinerja di Level Provinsi serta Laporan LkjIP juga akan menjadi acuan dan penyesuaian perencanaan Kinerja Untuk Tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Sosial Prov. Kaltim pada Tahun 2024 melaksanakan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara berjenjang (Internal) Pada Bidang-Bidang dan UPTD di Lingkungan Dinsos Prov. Kaltim.

2.3.3. Laporan Hasil Evaluasi SPM dan IKK

Laporan Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 secara teknis di entri dan dibuat melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran pelayanan yaitu pengukuran kegiatan dan pengukuran pencapaian SPM dan IKK.

Adapun hasil dari evaluasi SPM dan IKK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.5. Hasil evaluasi SPM dan IKK

URUSAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	0%	100%	64.89%	100%	0.34%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Klien Disabilitas yang Terlayani Dalam Panti
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	0.99%	100%	40.29%	100%	1.9%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Anak Terlantar yang Terlayani Dalam Panti
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	2.77%	100%	80.54%	100%	2.77%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Klien Lanjut Usia Terlantar Yang Terlayani Dalam Panti
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	0%	100%	0%	100%	10.36%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Klien Gelandangan dan Pengemis Yang Terlayani Dalam Panti
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	95.14%	100%	73.82%	100%	71.43%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial

2.3.4. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan Upaya pencapaian tema pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, tabel dibawah ini menunjukkan gambaran Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. (Terlampir Realisasi Anggaran)

Pada Tahun Anggaran 2024 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui 6 Program, 46 Kegiatan dan 148 Sub Kegiatan Secara keseluruhan Realisasi Anggaran APBD Januari sampai dengan Desember (anggran perubahan) adalah sebesar **Rp. 134,297,509,745** dari total anggaran sebesar **Rp. 143,730,979,761** atau sebesar **93.43%**,

Tabel. 2.6. Anggaran dan Ralisasi Pendanaan Dinsos Prov. Kaltim

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RASIO	RATA RATA PERTUMBUHAN
2020	Rp. 56,652,801,485	Rp. 50,193,200,643	89.60%	0.20
2021	Rp. 63,253,581,905	Rp. 56,332,142,679	89.06%	0.10
2022	Rp. 83,982,567,671	Rp. 77,721,794,050	92.55%	0.24
2023	Rp. 81,961,664,182	Rp. 78,911,900,379	96.28%	-0.02
2024	Rp. 143,730,979,761	Rp. 134,297,509,745	93.43%	0.43

2.4. KELOMPOK SASARAN

Adapun untuk kelompok sasaran yang ingin dicapai pada Program Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.7. Kelompok Sasaran Dinsos Prov. Kaltim

NO	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	ASN Dinas Sosial Prov. Kaltim
2	Program Pemberdayaan Sosial	• Undian Gratis Berhadiah (UGB); • Lembaga (PSKS).
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	• Pekerja Migran Bermasalah; • Warga Tindak Kekerasan
4	Program Rehabilitasi Sosial (Dinas dan UPTD)	• Penyandang Disabilitas Terlantar; • Anak Terlantar / Miskin; • Lanjut Usia Terlantar; • Gelandangan dan Pengemis; • PMKS; • Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	• Pengangkatan Anak oleh orang tua asuh; • Masyarakat Miskin; • Veteran Perang; • Janda Veteran Perang; • Lanjut Usia Terlantar; • Penyandang Disabilitas Terlantar.
6	Program Penanganan Bencana	• Korban Bencana Alam; • Korban Bencana Sosial;
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	• Taman Makam Pahlawan

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANAN TIMUR

2.4.1. ANALISA RENSTRA K/L

2.4.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia.

a. Visi

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia 2025 – 2029 adalah **“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang berkelanjutan dan Berkeadilan”**.

b. Misi

Adapun misi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia 2025-2029 ada dua yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya, dan Bermartabat;
2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Baik dan Bersih

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan;
2. Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan efisien

2.4.1.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemensos RI

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan rentan yang inklusif dengan indikator kinerja adalah : Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS);
2. Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang berdampak dengan indikator kinerja sebagai berikut : Indeks Reformasi Birokrasi.

2.4.1.3. Program Prioritas Kementerian Sosial

Adapun Program Prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia di Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Program BPNT;
3. Program Penanganan Bencana;
4. Serta program-program lainnya yang menjadi program Kementerian Sosial RI.

2.4.2. Analisa Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai dengan visi dan misi masing Pemerintah Kabupaten/Kota maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyelaraskan visi dan misi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dan Kementerian Sosial RI, yang pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pelayanan sosial.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota, pemerintah dalam hal ini instansi sosial Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara umum terdiri dari :

1. Pengembangkan Model Kelembagaan Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Perlindungan Sosial;
2. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pelindungan Sosial dan Hukum Bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Tuna Sosial;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PPKS;
4. Membangun Kerja Sama Kemitraan Antara Pengusaha Dan Kelompok Usaha Fakir Miskin Serta Meningkatkan Kemampuan (*Capacity Building*) Bagi Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PPKS lainnya;
5. Meningkatkan Pelayanan Psikososial dan Pembangunan Pusat Pelayanan Krisis (Trauma Center) Bagi PPKS, Termasuk Korban Bencana Alam dan Sosial.

Selain pendekatan kebijakan tersebut diatas penyediaan data terkait PPKS yang akurat juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota.

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara; (2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok usaha bersama secara terpadu, pemberdayaan penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Renstra Provinsi Kaltim telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan sosial dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.8. Identifikasi Permasalahan Tiap Bidang Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

BIDANG	MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	AKAR MASALAH
Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya pendayaagunaan dan Pemanfaatan PSKS	Terbatasnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Minimnya PSKS yang terakreditasi dan tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk proses akreditasi dan sertifikasi
Rehabilitasi Sosial	Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan sosial dalam panti untuk mewujudkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rendahnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum maksimalnya Sumber Daya Aparatur dan ketersediaan sarana / prasarana rehabilitasi sosial didalam panti (Pemerintah dan LKS Panti swasta)	- Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sesuai Standar Rehabilitasi Sosial - Terbatasnya Bantuan bagi LKS

BIDANG	MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	AKAR MASALAH
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyintas saat Bencana dan Pasca Bencana	Belum maksimalnya Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyintas saat Bencana dan Pasca Bencana	Belum optimalnya Kapasitas Sumber Daya (SDM dan Biaya) Penanganan Bencana	▪ Terbatasnya Kuota Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Bencana; ▪ Kurangnya Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana
Penanganan Fakir Miskin	Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya mengacu pada DTKS	▪ Belum Maksimalnya ketersediaan data BNBA kemiskinan dalam DTKS; ▪ Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata di DTKS ▪ Belum optimalnya pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).	▪ Sulitnya mengakses BNBA DTKS; ▪ Masih terbatasnya jenis usaha dalam pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); ▪ Terbatasnya pendampingan kepada penerima bantuan.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diatas, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan PSKS);
2. Peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan unit kerja penganggaran (Bappeda, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah, DPRD);
3. Peningkatan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait;

4. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara optimal;
5. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PPKS.

Faktor Internal

1. Peningkatan Kualitas data Panti / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
2. Fasilitasi proses akreditasi dan sertifikasi
3. Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Bencana;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana;
5. Meningkatkan SDM operator data terpadu kesejahteraan di Tingkat kab/kota melalui kegiatan Bimtek dan sosialisasi;
6. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
7. Peningkatan pemberian bantuan UEP Perorangan.

Faktor Eksternal

1. Peningkatan pemahaman peraturan terkait Standar Rehabilitasi Sosial dalam pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. Partisipasi PSKS dalam Melaksanakan Pelayanan;
3. Ketersediaan Lumbung Sosial;
4. Ketersediaan Relawan Penanganan Bencana;
5. Koordinasi yang berkesinambungan dengan Dinas Sosial kabupaten/kota terkait program perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Dukungan Kementerian sosial dalam memberikan akses DTKS pada aplikasi SIKS-NG tingkat provinsi Kab/kota agar memiliki data yang valid

2.6.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial. Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Provinsi Kalimantan Timur dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9. Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : KALIMANTAN TIMUR SUKSES MENUJU GENERASI EMAS			
MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Penanganan Bencana 4. Program Pemberdayaan Sosial	1. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial	- Belum lengkap nya Regulasi yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial; - Terbatasnya anggaran Penanganan Kesejahteraan Sosial; - Lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan PPKS.	- Keterlibatan sektor lain dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial; - Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial; - Program program kesejahteraan sosial yang adaptable.

Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	UPTD Panti Sosial	Banjir	Daerah Rawan Banjir	Komitmen kepala daerah

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong

keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	UPTD Panti Sosial	Belum Optimalnya Pelayanan di UPTD Panti Sosial	Beberapa area panti sosial milik pemerintah berada di pemukiman padat penduduk serta rawan banjir	Relokasi UPTD ke wilayah tidak rawan bencana
2.	Kampung Siaga Bencana (KSB)	Daerah rawan bencana yang tersebar luas	Minimnya anggaran Kab/Kota untuk membentuk KSB	Komitmen Kepala Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.6.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terlebih pasca ditetapkannya Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu

Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Sosial yang terintegrasi dan Berbasis Data;
2. Peningkatan kualitas data untuk ketepatan sasaran penerima bantuan;
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kewenangan Provinsi;
4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
5. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
6. Kejadian Bencana yang disebabkan karena ketidakpastian iklim, Perubahan Kondisi Alam dan Sosial Masyarakat.

Tabel 2.12. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Prov. Kaltim

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU TRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan Pelayanan bagi PPKS	Peningkatan pemahaman peraturan terkait Standar Rehabilitasi Sosial dalam pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan Kualitas data Panti / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Peningkatan Kualitas Panti / LKS harus menjadi perhatian dan di terapkan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kewenangan Provinsi;

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU TRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pendayagunaan dan pemanfaat PSKS	Belum optimalnya pendayagunaan dan Pemanfaatan PSKS	Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Partisipasi PSKS dalam proses akreditasi dan sertifikasi	Fasilitasi proses akreditasi dan sertifikasi	Penting untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sdm dan selalu memberdayakan PSKS	Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
Bencana dan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyintas saat Bencana dan Pasca Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Bagi Korban Bencana	• Ketersediaan Lumbung Sosial; • Ketersediaan Relawan Penanganan Bencana	• Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Bencana; • Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana	Perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi antar sektor dan unit terkait dalam penanganan masalah bencana	• Kejadian Bencana yang disebabkan karena ketidakpastian iklim, Perubahan Kondisi Alam dan Sosial Masyarakat • Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kewenangan Prov
Penanggulangan Kemiskinan	Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan	• Meningkatkan SDM operator data terpadu kesejahteraan di Tingkat Provinsi/ Kab/Kota; • Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; • Peningkatan pemberian bantuan UEP Perorangan.	• Koordinasi yang berkesinambungan dengan Dinas Sosial kab/kota terkait program perlindungan dan Jaminan Sosial; • Dukungan Kementerian sosial dalam memberikan akses DTKS pada aplikasi SIKS-NG tingkat provinsi Kab/kota agar memiliki data yang valid	Berkoordinasi secara berkesinambungan baik dengan Kab/Kota, Kemensos	• Peningkatan Pelayanan Sosial yang terintegrasi dan Berbasis Data; • Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan; • Peningkatan kualitas data untuk ketepatan sasaran penerima bantuan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Cascading Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan akan penerapan konsep Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan sebagai penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dimana selaras dengan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : **“KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”**.

Maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu upaya guna mewujudkan Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan;
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif;
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah;
5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi;
6. Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN;
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK;
8. Kemandirian Pangan;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan menindaklanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029.

Adapun Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2025-2029 yang menjadi perwujudan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai visi adalah :

Misi 1 : “Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Sejahtera”.

Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan **“Tujuan Renstra”** untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan dengan mengambil sasaran pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

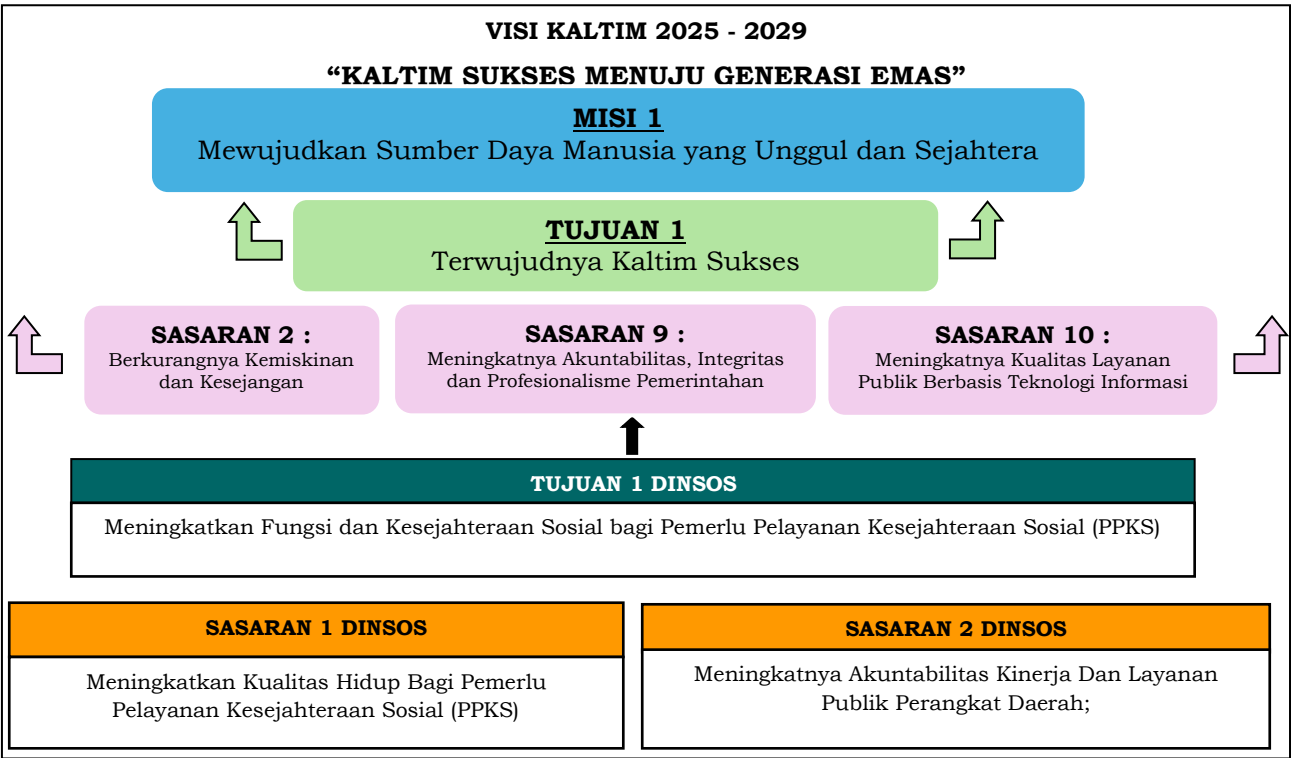
Adapun Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : **“Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**.

Untuk mewujudkan Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa Sasaran untuk terwujudnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya adalah :

SASARAN :

- 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinsos



Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, melaksanakan misi Pertama untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan Terkait Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan pada Bidang Sosial. Pemanfaatan secara optimal terkait Pengentasan Kemiskinan merupakan tujuan utama agar meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan tujuan dan sasaran yang akan diambil. Strategi digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Sosial dan kebijakan diambil dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan.

Adapun pernyataan dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG/URUSAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Berkurangnya Kemiskinan dan Kesejangan	Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	6.66	24.26	29.01	33.77	38.53	43.29
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	45	55	65	75	85	100
					Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100	100	100	100	100	100
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	100	100
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulihan	-	3	9	9	10	10

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG/URUSAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100	100	100	100	100	100
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100	100	100	100	100	100
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	100	100	100
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	40	60	60	70	90	100
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100	100	100	100	100	100
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	100	100	100
					Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial	100	100	100	100	100	100
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkatkan Tata Kelolanya	1	1	1	1	1	1
Terlaksananya Pembangunan yang Berkelanjutna	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	84%	86%	88%	90%	92%	94%
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Prov. Kaltim

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JENIS INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dinas Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Tujuan	57.96	58.46	59.26	59.76	60.26	60.76	61.06
2	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10% Tahunan	Sasaran	12	12	10	10	10	10	10
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran	75.55	76.55	78.55	81.1	83.4	85.8	87.1
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Sasaran	82	84	85	86	87	88	89

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur, telah disusun Kegiatan Unggulan yang merupakan kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 untuk mencapai Misi 1 (Satu) dan Gratispol dalam hal Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan. Adapun Kegiatan Unggulan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang serta Pengemis dalam Panti;
2. Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bagi Masyarakat miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
3. Pemberian Bantuan Sosial Terencana (BST);
4. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan unggulan dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Kepala Daerah. Pelaksanaan kegiatan unggulan bersinergi antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

Cascading Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Cascading Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
MENINGKATKAN FUNGSI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah izin PUB melalui aplikasi online yang tertata dengan baik dan sesuai aturan
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar				
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Perseorangan kewenangan provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi
						Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
						Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
						Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlanta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
						Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Sanding	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
						Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi
						Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
						Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Gelandangan dan Pengemis (KDRT), Korban Tindak Kekerasan (KTK), dan Trafficking yang dibina, dilayani, dilindungi di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
						Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
						Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan
						Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi
						Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi
						Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Penyediaan Perma Kanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi
						Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi
						Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Penanganan Bencana
			Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkat Tata Kelolanya			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

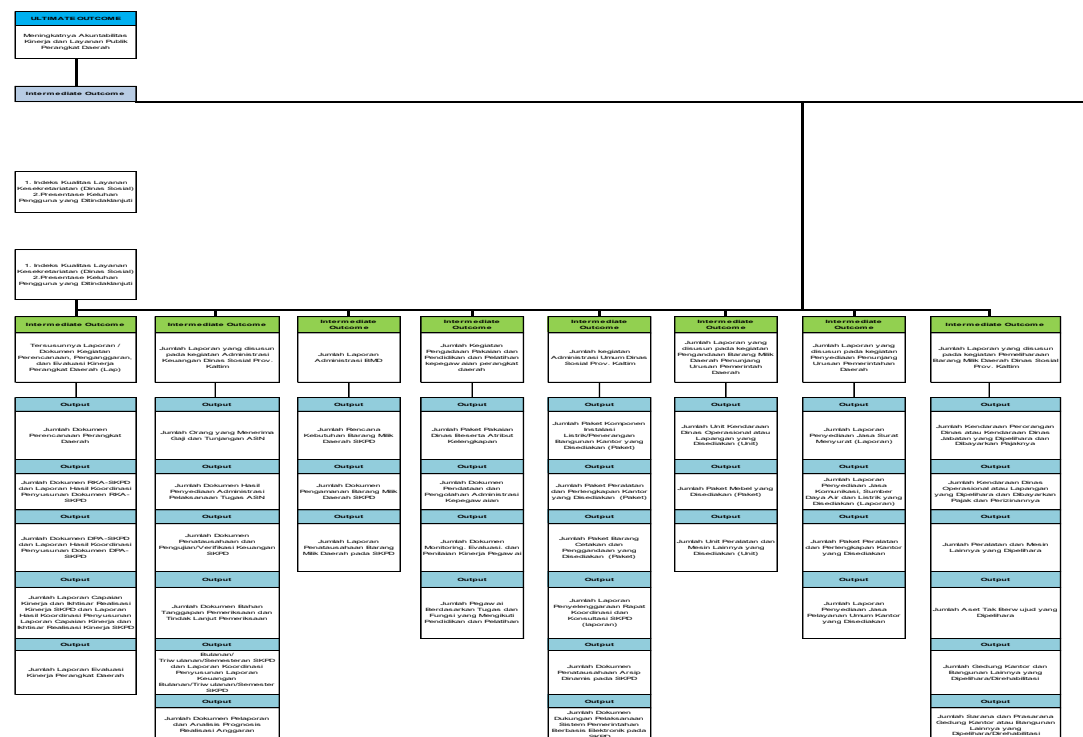
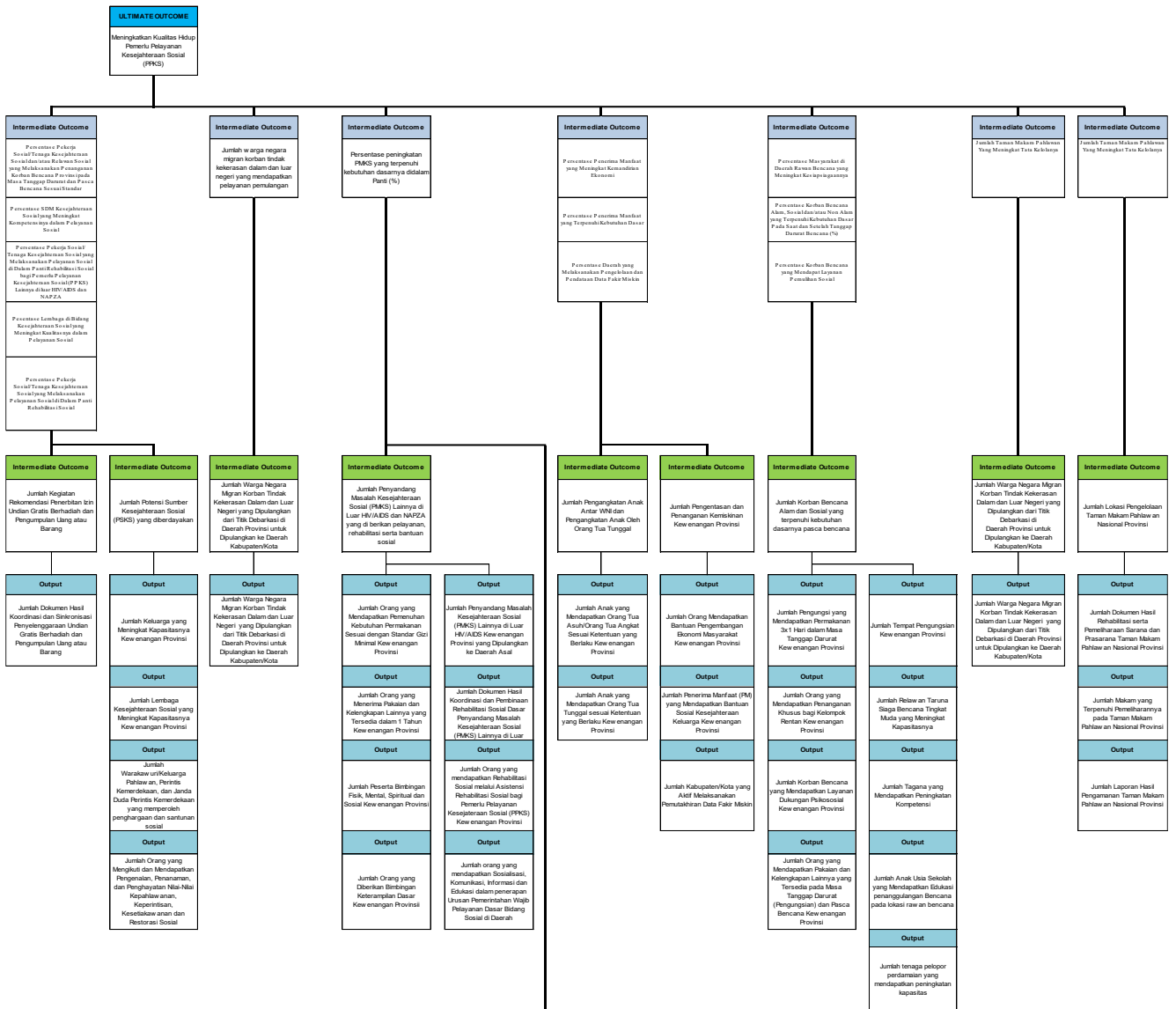
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

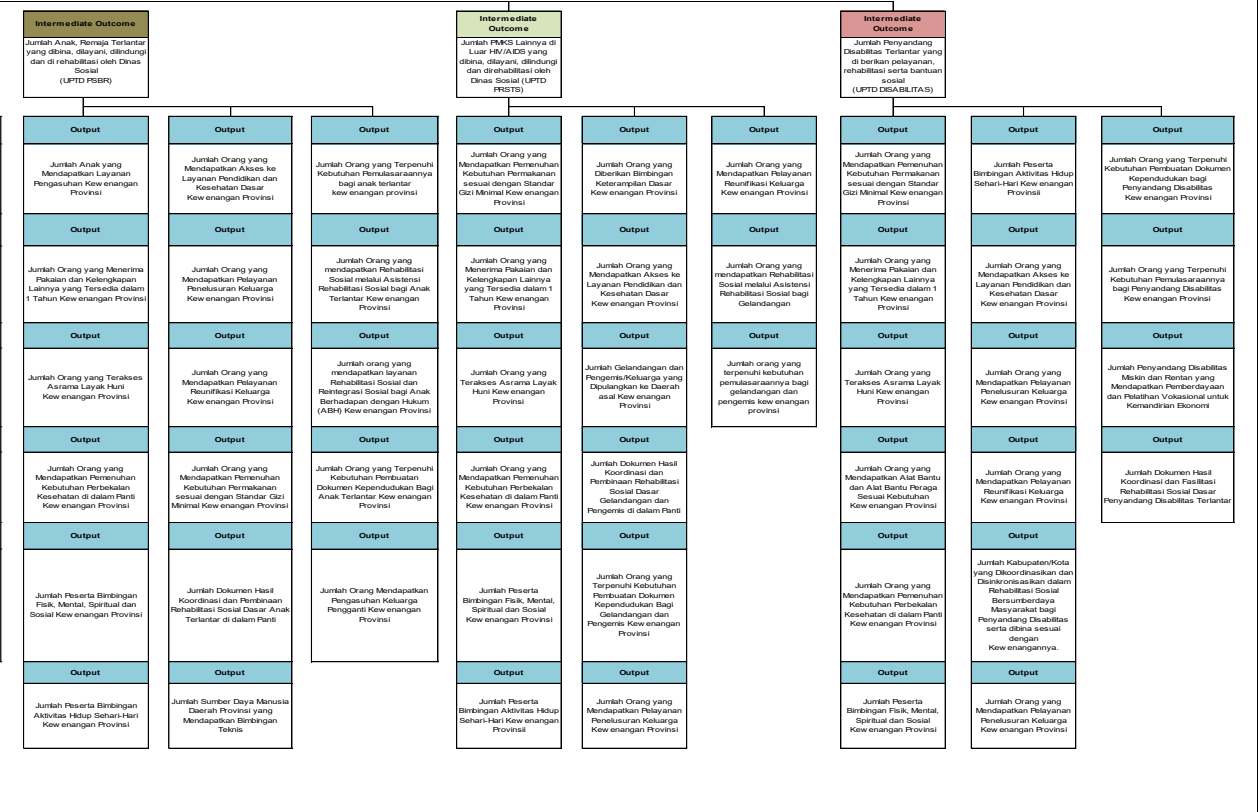
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

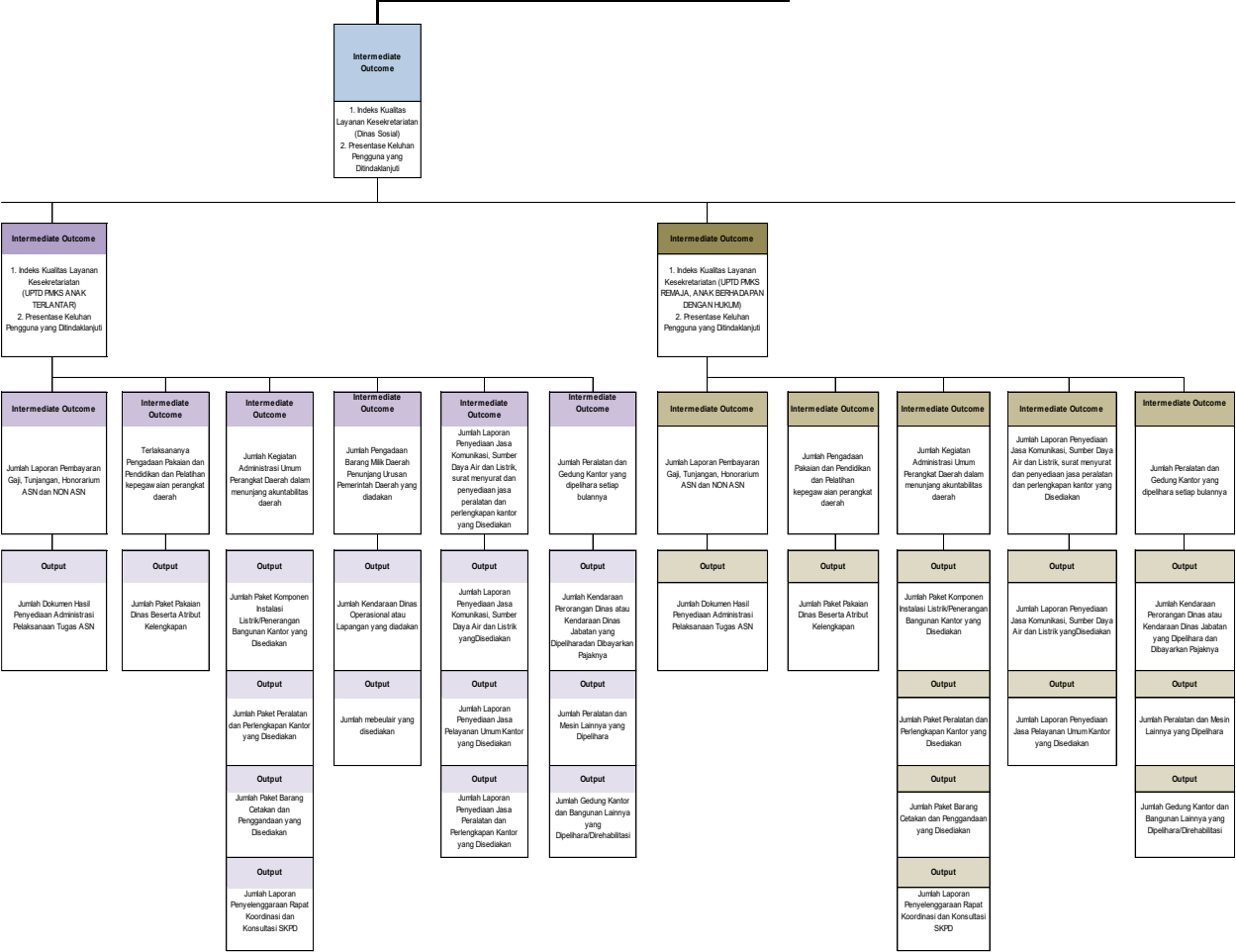
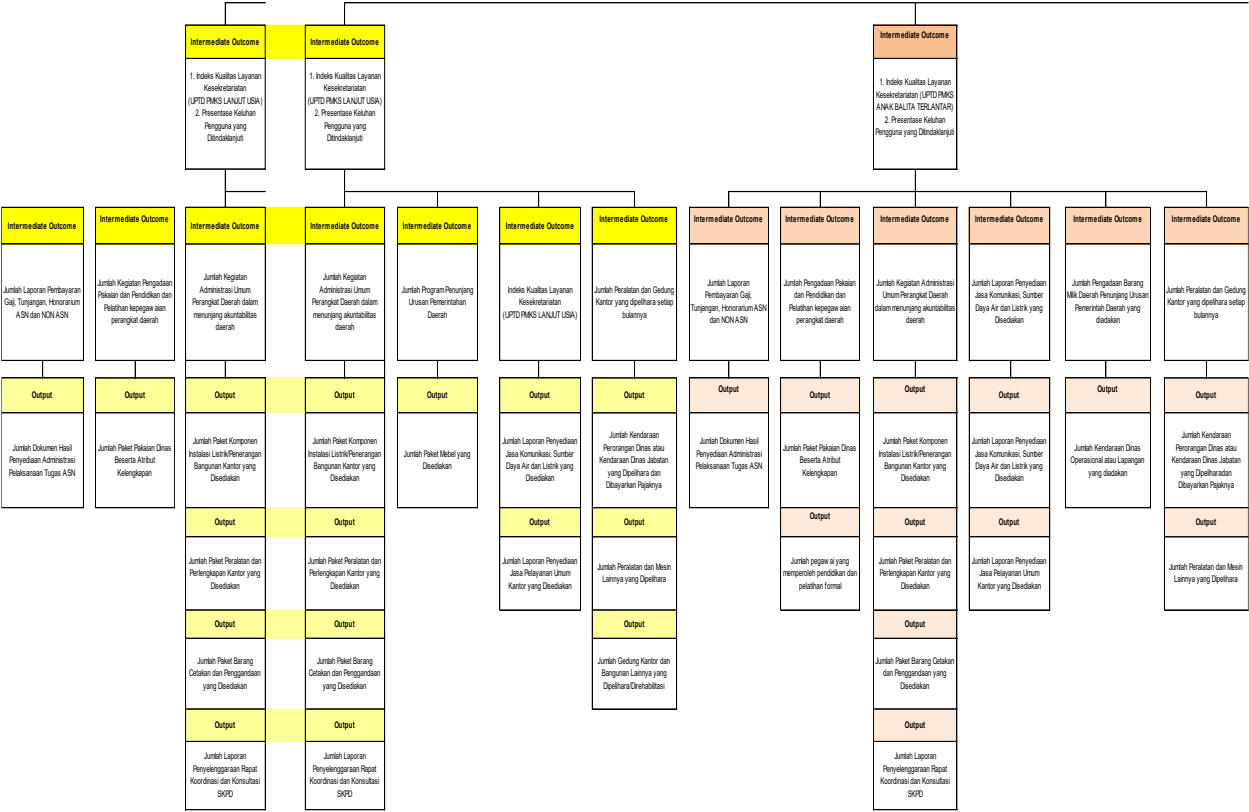
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)

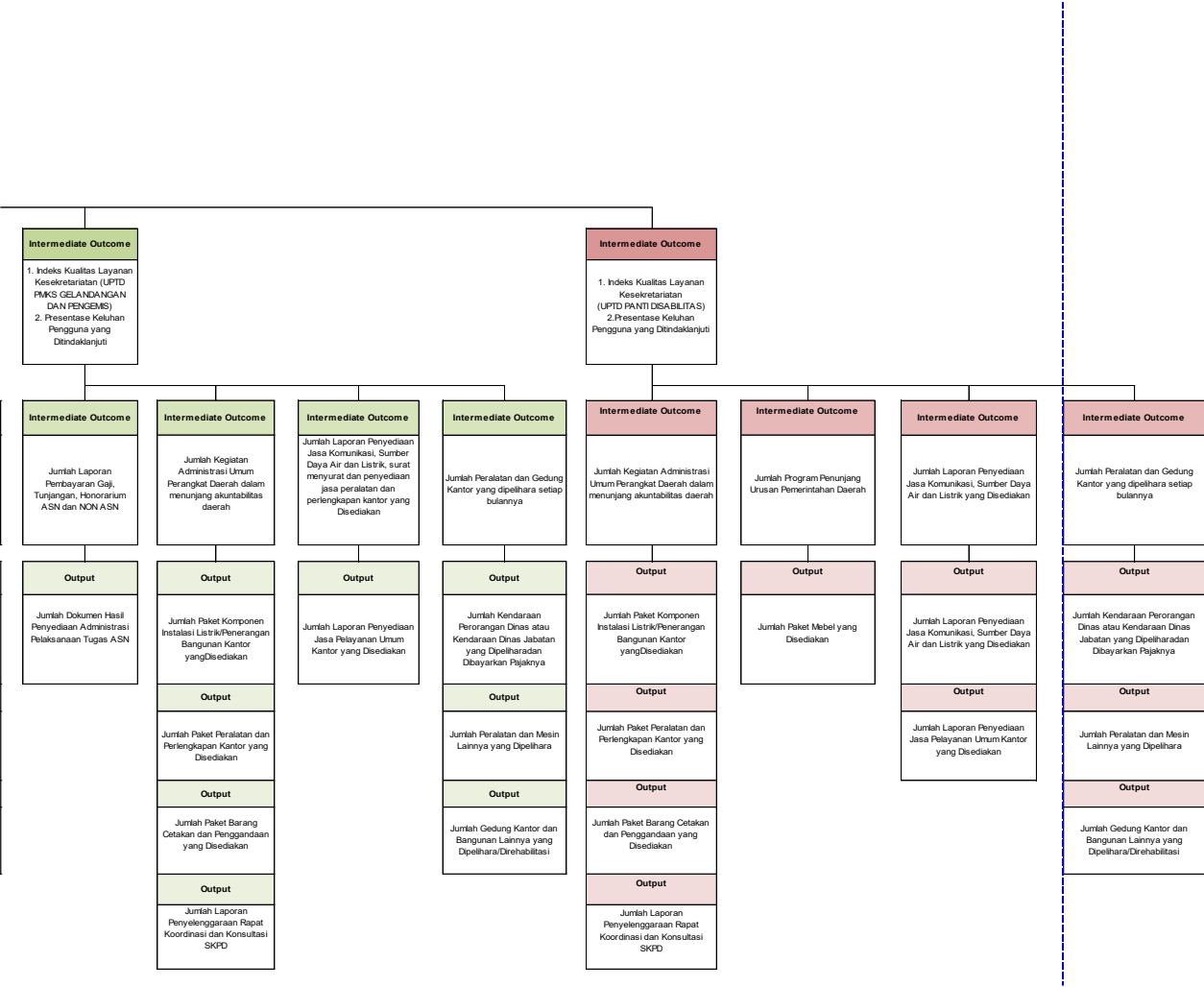
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim









3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memainkan peran yang sangat penting dalam rangka mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan dan Terwujudnya Kaltim Sukses dengan tujuan Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan, sebagai jalan keluar atas permasalahan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun komoditas unggulan Dinas Sosial Adalah Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang serta Pengemis dalam Pant, Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bagi Masyarakat miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pemberian Bantuan Sosial Terencana (BST) serta Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu 2025-2029. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor kemiskinan.

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Dinas Sosial Prov. Kaltim guna mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan rencana strategis dan arah kebijakan organisasi.

Strategi untuk mencapai Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis kemiskinan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis di seputar layanan serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional. Selain itu, Adapun Strategi pembangunan yang diambil dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Prov. Kaltim beserta penjabaran dari arah kebijakan yang akan dikerjakan, dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, yang menjadi yang menggambarkan arah prioritas

pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Adapun penahapan pembangunan RENSTRA secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA	AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PPKS	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI	PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF	KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Peningkatan kualitas SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan pelayanan sosial	Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerataan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Keberlanjutan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial. Olehkarena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Provinsi Kalimantan Timur dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : KALIMANTAN TIMUR SUKSES MENUJU GENERASI EMAS			
MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Program Penanganan Bencana 4. Program Pemberdayaan Sosial	1. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial	▪ Belum lengkap nya Regulasi yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial; ▪ Terbatasnya anggaran Penanganan Kesejahteraan Sosial; ▪ Lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan PPKS.	▪ Keterlibatan sektor lain dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial; ▪ Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial; ▪ Program program kesejahteraan sosial yang adaptable.

Adapun penjabaran hubungan antara visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran & Strategi Dinsos Prov. Kaltim

Visi	“ Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas ”
Misi	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
	2. Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
	5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
	6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI
Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
		2. Perluasan layanan dengan melakukan kerjasama dengan LKS dan meningkatkan layanan rehabilitasi berbasis Masyarakat;
		3. Menambah kapasitas daya tampung dalam panti Peningkatan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pencapaian SPM.
		4. Meningkatkan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial
		5. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana
		6. Peningkatan Kualitas SDM dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
		7. Meningkatkan nilai-nilai Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

Tabel 3.7. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA
Dinas Sosial Prov. Kaltim

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINSOS PROV. KALTIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan bagi Korban Bencana sesuai dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial	1. Penurunan Penduduk Miskin serta Perlindungan Sosial Adaptif bagi seluruh Masyarakat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	▪ Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS dalam Panti Pemerintah dan Panti Swasta; ▪ Meningkatkan sarana dan prasana dalam panti; ▪ Peningkatan Kapasitas SDM LKS melalui Sertifikasi Pendampingan bagi LKS yang menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti;	
		2. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan Penyandang Disabilitas	▪ Meningkatkan Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ▪ Peningkatan kualitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM); ▪ Pengembangan infrastruktur sistem informasi kesejahteraan sosial yang memadai;	
			Meningkatkan Bantuan bagi Korban Pasca Bencana Alam dan Sosial	
			Peningkatan fasilitasi kepada seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk proses akreditasi dan sertifikasi	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda.

Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “hasil akhir” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

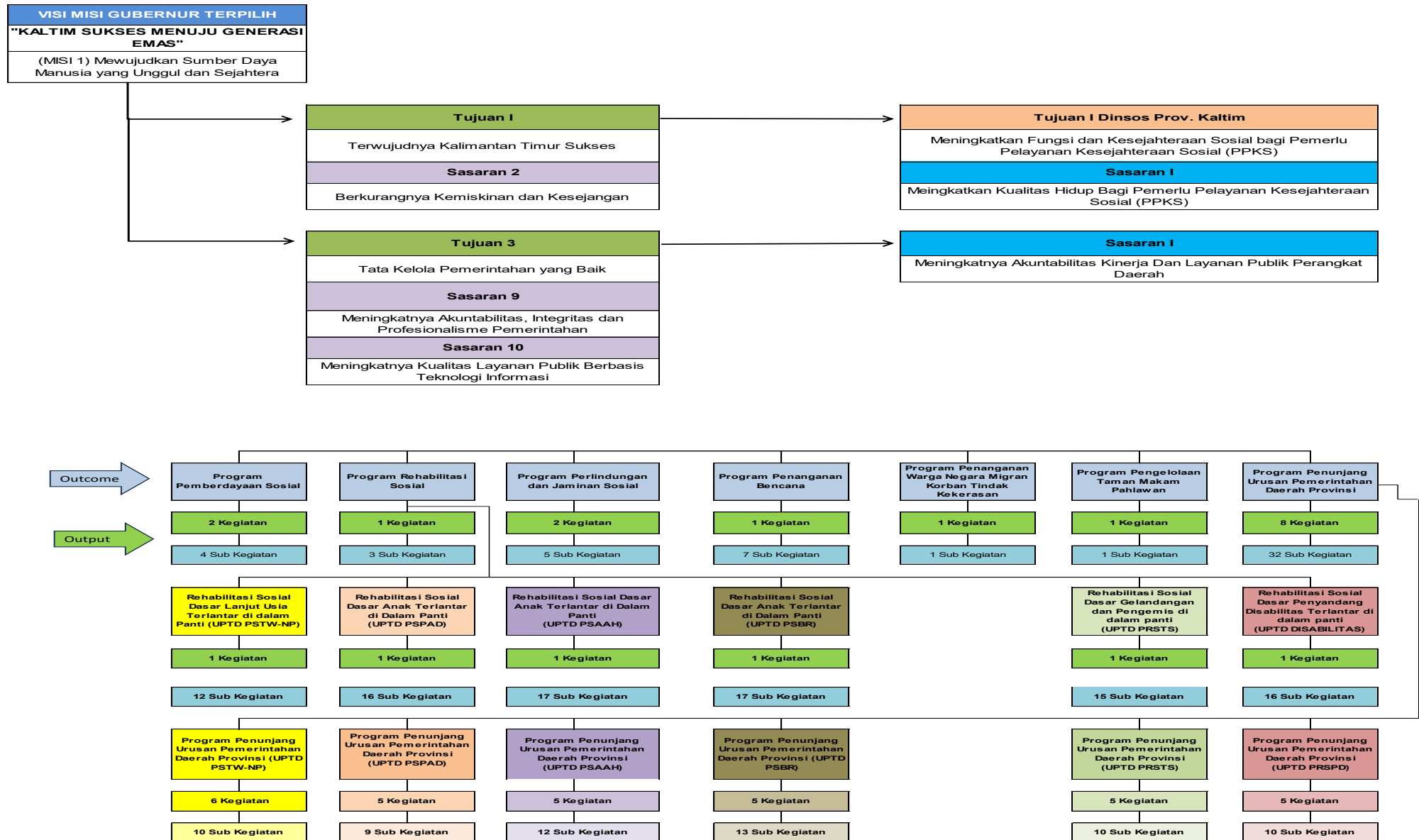
Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya (Gambar 3.1), langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun rencana program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator target kinerja utama dan rencana beberapa kegiatan beserta indikator target kinerja individu, diuraikan sesuai perkiraan pendanaan sampai dengan tahun 2030. Penetapan rencana disertai juga dengan lokus pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4	5	6	7		8
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses Sasaran 2 : Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan	Tujuan 1 : Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)			
			Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial			
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA			
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial			
				Terlaksananya Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	1.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
						1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
			Tertanganinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
						1.2.3	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
						2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
						2.1.1	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			kembalinya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya PMKS Penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						3.1.1	Penyediaan Permakanan	
						3.1.2	Penyediaan Sandang	
						3.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						3.1.4	Penyediaan Alat Bantu	
						3.1.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						3.1.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						3.1.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						3.1.8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						3.1.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						3.1.10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						3.1.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	
						3.1.12	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	
						3.1.13	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
						3.1.14	Pemulasaraan	
						3.1.15	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
							Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	
						3.1.16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
				Terlaksananya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	3.2	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
						3.2.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
						3.2.2	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
						3.2.3	Pemulangan ke Daerah Asal	
						3.2.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
						3.2.5	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
							Kesejahteraan Sosial (PPKS) 112 Usulan Aspirasi	
						3.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
						4	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
				Terlaksananya PMKS Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
						4.1.1	Penyediaan Permakanan	
						4.1.2	Penyediaan Sandang	
						4.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						4.1.4	Penyediaan Alat Bantu	
						4.1.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
						4.1.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
						4.1.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						4.1.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						4.1.9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						4.1.10	Pemulasaraan	
						4.1.11	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
						4.1.12	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
						5	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
				Terlaksananya PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	5.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						5.1.1	Pengasuhan	
						5.1.2	Penyediaan Sandang	
						5.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						5.1.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						5.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						5.1.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						5.1.7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						5.1.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						5.1.9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						5.1.10	Penyediaan Permakanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						5.1.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						5.1.12	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
						5.1.13	Pemulasaraan	
						5.1.14	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
						5.1.15	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
						5.1.16	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
						6	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	
				Terlaksananya PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						6.1.1	Pengasuhan	
						6.1.2	Penyediaan Sandang	
						6.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						6.1.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						6.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						6.1.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						6.1.7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						6.1.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						6.1.9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						6.1.10	Penyediaan Permakanan	
						6.1.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						6.1.12	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
						6.1.13	Pemulasaraan	
						6.1.14	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
						6.1.15	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
						6.1.16	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
						6.1.17	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
						7	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
				Terlaksananya PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Persentase PMKS anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	7.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
				dasarnya di dalam Panti (%)	dalam Panti (%)			
						7.1.1	Pengasuhan	
						7.1.2	Penyediaan Sandang	
						7.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						7.1.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						7.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						7.1.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						7.1.7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						7.1.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						7.1.9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						7.1.10	Penyediaan Permakanan	
						7.1.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						7.1.12	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
						7.1.13	Pemulasaraan	
						7.1.14	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						7.1.15	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
						7.1.16	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
						7.1.17	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
						8	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	
				Terlaksananya PMKS gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	8.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
						8.1.1	Penyediaan Permakanan	
						8.1.2	Penyediaan Sandang	
						8.1.3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
						8.1.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						8.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
						8.1.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						8.1.7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
						8.1.8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						8.1.9	Pemulangan ke Daerah Asal	
						8.1.10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
						8.1.11	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
						8.1.12	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						8.1.13	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						8.1.14	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	
						8.1.15	Pemulasaraan	
			Berkurangnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar			
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin			
				Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal		9.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
						9.1.1	Pengangkatan Anak antar WNI	
						9.1.2	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
				Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi		9.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
						9.2.1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						9.2.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						9.2.3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
			Keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	10	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)			
					Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial			
				Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana		10.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
						10.1.1	Penyediaan Permakanan	
						10.1.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						10.1.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	
						10.1.4	Penyediaan Sandang	
						10.1.5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						10.1.6	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
						10.1.7	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik		11	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		11.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						11.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						11.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
		Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan			Indikator 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
		Publik Perangkat Daerah;			Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat			
			1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) 2. Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						12.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						12.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						12.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						12.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
						12.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						12.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						12.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						12.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						12.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						12.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						12.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	
							Tanggapan Pemeriksaan	
						12.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						12.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						12.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						12.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						12.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						12.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						12.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						12.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						12.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						12.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						12.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						12.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						12.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						12.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						12.5.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						12.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						12.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						12.6.1	Pengadaan Mebel	
						12.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						12.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						12.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						12.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						12.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						12.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						12.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						12.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						12.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
							Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						12.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						12.8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						12.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						12.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						13	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
						13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						13.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						13.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						13.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						13.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						13.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						13.1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						13.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						13.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						13.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						13.1.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						13.1.11	Pengadaan Mebel	
						13.1.12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						13.1.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						13.1.14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						13.1.15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						13.1.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						13.1.17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						13.1.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						13.1.19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
						13.1.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						14	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
						14.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						14.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						14.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						14.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						14.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						14.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						14.1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						14.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						14.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						14.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						14.1.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						14.1.11	Pengadaan Mebel	
						14.1.12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						14.1.13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						14.1.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						14.1.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						14.1.16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						14.1.17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						14.1.18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						14.1.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						15	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	
						15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						15.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						15.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						15.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						15.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						15.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						15.1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						15.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						15.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						15.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						15.1.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						15.1.11	Pengadaan Mebel	
						15.1.12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						15.1.13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						15.1.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						15.1.15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						15.1.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						15.1.17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						15.1.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						15.1.19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						15.1.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						16	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
						16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						16.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						16.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						16.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						16.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						16.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						16.1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						16.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						16.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						16.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						16.1.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						16.1.11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						16.1.12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						16.1.13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						16.1.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						16.1.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						16.1.16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						16.1.17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
							Operasional atau Lapangan	
						16.1.18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						16.1.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						16.1.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						17	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	
						17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						17.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						17.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						17.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						17.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						17.1.5	Administrasi Umum Perangkat	
						17.1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						17.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						17.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						17.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
						17.1.10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						17.1.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						17.1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						17.1.13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						17.1.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						17.1.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						17.1.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan La	

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	36%	100%	1,420,683,662	100%	1,261,086,028	100%	2,645,000,000	100%	2,865,000,000	100%	3,090,000,000	100%	3,290,000,000	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		6,66%		24,26%		29,01%		33,77%		38,53%		43,29%		
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	45%	45%		55%		65%		75%		85%		100%		
	Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dok	135,610,048	18 Dok	219,627,489	20 Dok	250,000,000	23 Dok	275,000,000	25 Dok	300,000,000	25 Dok	300,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dok	135,610,048	18 Dok	219,627,489	20 Dok	250,000,000	23 Dok	275,000,000	25 Dok	300,000,000	25 Dok	300,000,000	
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	1,285,073,614	4 PSKS	1,041,458,539	4 PSKS	2,395,000,000	4 PSKS	2,590,000,000	4 PSKS	2,790,000,000	4 PSKS	2,990,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	40 Orang	20 Orang	152,256,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	30 Orang	233,803,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	55 Keluarga	10 Lembaga	70,661,940	10 Lembaga	90,353,940	10 Lembaga	100,000,000	10 Lembaga	110,000,000	10 Lembaga	120,000,000	10 Lembaga	120,000,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun													KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	umlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	-	-	100 Orang	120,000,000	100 Orang	120,000,000	100 Orang	120,000,000	100 Orang	120,000,000	100 Orang	120,000,000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Perseorangan kewenangan provinsi	-	-	-			305 Orang	875,000,000	355 Orang	960,000,000	405 Orang	1,050,000,000	405 Orang	1,050,000,000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi	237 lembaga	100 Lembaga	828,350,794	100 Lembaga	831,104,599	150 Lembaga	1,300,000,000	175 Lembaga	1,400,000,000	200 Lembaga	1,500,000,000	237 Lembaga	1,700,000,000		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	25,200,000	9 Orang	111,600,000	9 Orang	111,600,000	10 Orang	124,000,000	10 Orang	124,000,000		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	3 Orang	25,200,000	9 Orang	75,600,000	9 Orang	75,600,000	10 Orang	84,000,000	10 Orang	84,000,000		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-	-	3 Orang	25,200,000	9 Orang	75,600,000	9 Orang	75,600,000	10 Orang	84,000,000	10 Orang	84,000,000		
Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang	-	-	3 Orang	-	9 Orang	36,000,000	9 Orang	36,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	-	-	-			9 Orang	36,000,000	9 Orang	36,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.31 %	100%	17,181,670,130	100%	11,952,287,147	100%	13,447,515,862	100%	14,792,267,448	100%	16,271,494,193	100%	17,898,643,612		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7.720 Orang	7.427 Orang	17,181,670,130	6110 Orang	11,952,287,147	6.710 Orang	13,447,515,862	6.710 Orang	14,792,267,448	6.710 Orang	16,271,494,193	6.710 Orang	17,898,643,612		

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7.630 Orang	6.981 Orang	14,301,005,600				-		-		-		-	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	189 Orang	444,415,090				-		-		-		-	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	75 Orang	168,761,820	50 Orang	100,083,360	50 Orang	110,091,696	50 Orang	121,100,866	50 Orang	133,210,952	50 Orang	146,532,047	
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-	32 Orang	351,565,480	40 Orang	679,641,680	40 Orang	747,605,848	40 Orang	822,366,433	40 Orang	904,603,076	40 Orang	995,063,384	
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	150 Orang	669,824,875	150 Orang	386,820,000	150 Orang	425,502,000	150 Orang	468,052,200	150 Orang	514,857,420	150 Orang	566,343,162	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	20 Dokumen	1,246,097,265	1 Dokumen	289,125,807	1 Dokumen	318,038,388	1 Dokumen	349,842,226	1 Dokumen	384,826,449	1 Dokumen	423,309,094	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	-	-	-	5.770 Orang	10,407,350,000	5.770 Orang	11,448,085,000	5.770 Orang	12,592,893,500	5.770 Orang	13,852,182,850	5.770 Orang	15,237,401,135	
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-	-	-			600 Orang	300,000,000	600 Orang	330,000,000	600 Orang	363,000,000	600 Orang	399,300,000	
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	-	-	-	100 Orang	89,266,300	100 Orang	98,192,930	100 Orang	108,012,223	100 Orang	118,813,445	100 Orang	130,694,790	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	45%	48%	21,686,110,139	100%	10,856,500,000	100%	11,432,100,000	100%	12,368,310,000	100%	13,398,141,000	100%	14,530,955,100	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	30%	40%		60%		60%		70%		90%				
Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	18 Orang	166,961,500	18 Orang	103,499,822	18 Orang	113,849,804	18 Orang	125,234,785	18 Orang	137,758,263	18 Orang	151,534,089	
Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang	148,681,500	15 Orang	94,629,822	15 Orang	104,092,804	15 Orang	114,502,085	15 Orang	125,952,293	15 Orang	138,547,522	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang	18,280,000	3 Orang	8,870,000	3 Orang	9,757,000	3 Orang	10,732,700	3 Orang	11,805,970	3 Orang	12,986,567	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13.544 Orang	11.008 Orang	21,519,148,639	5985 Orang	10,753,000,178	5975 Orang	11,318,250,196	5975 Orang	12,243,075,215	5975 Orang	13,260,382,737	5975 Orang	14,379,421,011	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4000 Orang	4680 Orang	8,162,660,035	4500 Orang	8,083,479,280	4500 Orang	8,891,827,208	4500 Orang	9,781,009,929	4500 Orang	10,759,110,922	4500 Orang	11,835,022,014	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Orang	9418 Keluarga	13,060,500,000	1410 Orang	2,345,500,000	1400 Orang	2,070,000,000	1400 Keluarga	2,070,000,000	1400 Keluarga	2,070,000,000	1400 Keluarga	2,070,000,000	
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	3 kab/kota	4 kab/kota	295,988,604	6 kab/kota	323,020,898	6 kab/kota	355,322,988	7 kab/kota	390,855,287	9 kab/kota	429,940,815	10 kab/kota	472,934,897	
Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	-	-	-	75 Orang	1,000,000	75 Orang	1,100,000	75 Orang	1,210,000	75 Orang	1,331,000	75 Orang	1,464,100	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100%	100 %	8,157,061,681	100 %	8,574,068,970	100 %	12,481,226,683	100 %	13,140,399,227	100 %	14,034,021,262	100 %	14,650,604,647	
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	17.870 Orang	8,157,061,681	12.500 Orang	8,574,068,970	15.500 Orang	12,481,226,683	15.500 Orang	13,140,399,227	15.500 Orang	14,034,021,262	15.500 Orang	14,650,604,647	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	17.870 Orang	17.870 Orang	6,316,087,210	12.500 Orang	5,748,375,960	15.500 Orang	7,178,348,368	15.500 Orang	7,357,807,077	15.500 Orang	7,541,752,254	15.500 Orang	7,730,296,060	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1.000 Orang	900 Orang	180,035,350	900 Orang	345,049,750	900 Orang	353,675,994	900 Orang	362,517,894	900 Orang	371,580,841	1.000 Orang	380,870,362	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	1.000 Orang	600 Orang	765,138,471	150 Orang	302,585,000	150 Orang	310,149,625	150 Orang	317,903,366	150 Orang	325,850,950	150 Orang	333,997,224	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1.000 Orang	1.000 Orang	332,791,900	1.000 Orang	545,091,600	1.000 Orang	558,718,890	1.000 Orang	572,686,862	1.000 Orang	587,004,034	1.000 Orang	601,679,135	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	1.000 Orang	1.000 Orang	563,008,750	1.000 Orang	777,374,500	1.000 Orang	796,808,863	1.000 Orang	816,729,084	1.000 Orang	837,147,311	1.000 Orang	858,075,994	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	40 Orang	257,610,368	40 Orang	257,610,368	40 Orang	257,610,368	40 Orang	257,610,368	40 Orang	257,610,368	
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	-	-	40 Orang	228,700,928	120 Orang	686,102,784	120 Orang	686,102,784	160 Orang	914,803,712	160 Orang	914,803,712	
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tanai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan langsung berupa Uang Tunai	Keluarga	-	-	-	-	75 Keluarga	1,125,000,000	100 Keluarga	1,500,000,000	125 Keluarga	1,875,000,000	150 Keluarga	2,250,000,000	
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-	-	-	400 Orang	184,640,432	600 Orang	243,070,432	800 Orang	297,300,432	1000 Orang	351,530,432	1000 Orang	351,530,432	
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat dilokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat dilokasi rawan	Orang	-	-	200 Orang	184,640,432	200 Orang	184,640,432	200 Orang	184,640,432	200 Orang	184,640,432	200 Orang	184,640,432	
Fasilitasi Pemetaan Rawan Konglik Sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	-	-	-	-	1 Daerah	200,000,000	1 Daerah	200,000,000	1 Daerah	200,000,000	1 Daerah	200,000,000	
Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	158,400,000	5 Dokumen	158,400,000	5 Dokumen	158,400,000	5 Dokumen	158,400,000	
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	40 Orang	228,700,928	40 Orang	228,700,928	40 Orang	228,700,928	40 Orang	228,700,928	
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat diwilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	-	-	-	-	1 Desa/Kelurahan	200,000,000	1 Desa/Kelurahan	200,000,000	1 Desa/Kelurahan	200,000,000	1 Desa/Kelurahan	200,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	746,565,489	1 Lokasi	343,447,485	1 Lokasi	627,984,485	1 Lokasi	637,984,485	1 Lokasi	647,984,485	1 Lokasi	657,984,485	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	746,565,489	1 Lokasi	343,447,485	1 Lokasi	627,984,485	1 Lokasi	637,984,485	1 Lokasi	647,984,485	1 Lokasi	657,984,485	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	1 Dokumen	452,531,600	1 Dokumen	32,903,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	130,000,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam	76,593,889	1 Makam	165,584,485	1 Makam	310,544,485	1 Makam	310,544,485	1 Makam	310,544,485	1 Makam	310,544,485	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	217,440,000	1 Laporan	144,960,000	1 Laporan	217,440,000	1 Laporan	217,440,000	1 Laporan	217,440,000	1 Laporan	217,440,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	82%	84%	68,358,814,194	86%	64,207,821,737	88%	68,514,100,077	90%	71,116,780,064	92%	72,684,058,799	94%	72,987,081,409	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Lap	5 Lap	1,336,351,380	5 Lap	1,575,233,500	5 Lap	1,652,833,500	5 Lap	1,745,560,000	5 Lap	1,855,000,000	5 Lap	1,935,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	6 Dok	511,708,012	6 Dok	540,560,000	6 Dok	560,560,000	6 Dok	600,560,000	6 Dok	620,000,000	6 Dok	700,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	67,800,000	2 Dok	269,700,000	2 Dok	300,000,000	2 Dok	330,000,000	2 Dok	350,000,000	2 Dok	350,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	17,400,000	2 Dok	17,700,000	2 Dok	25,000,000	2 Dok	35,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	3 Lap	577,129,900	3 Lap	575,975,500	3 Lap	595,975,500	3 Lap	600,000,000	3 Lap	620,000,000	3 Lap	620,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4 Lap	162,313,468	4 Lap	171,298,000	4 Lap	191,298,000	4 Lap	200,000,000	4 Lap	235,000,000	4 Lap	235,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Lap	6 Lap	52,360,729,589	6 Lap	56,702,832,708	6 Lap	59,762,832,708	6 Lap	61,851,832,708	6 Lap	62,861,832,708	6 Lap	62,861,832,708	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	165 Orang	341 Orang	51,370,263,215	320 Orang	55,703,227,130	320 Orang	58,703,227,130	320 Orang	60,703,227,130	320 Orang	61,703,227,130	320 Orang	61,703,227,130	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	2 Dok	502,320,000	2 Dok	504,240,000	2 Dok	534,240,000	2 Dok	564,240,000	2 Dok	574,240,000	2 Dok	574,240,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	2 Dok	174,943,660	2 Dok	178,354,060	2 Dok	178,354,060	2 Dok	198,354,060	2 Dok	198,354,060	2 Dok	198,354,060	
Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	2 Dok	11,553,019	2 Dok	11,553,100	2 Dok	21,553,100	2 Dok	25,553,100	2 Dok	25,553,100	2 Dok	25,553,100	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	4 Lap	216,413,357	4 Lap	220,007,625	4 Lap	260,007,625	4 Lap	290,007,625	4 Lap	290,007,625	4 Lap	290,007,625	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	85,236,338	2 Dok	85,450,793	2 Dok	95,450,793	2 Dok	100,450,793	2 Dok	100,450,793	2 Dok	100,450,793	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Lap	3 Lap	12,090,358	3 Lap	12,925,358	3 Lap	15,000,000	3 Lap	21,000,000	3 Lap	27,000,000	3 Lap	27,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	4,067,020	1 Dok	4,122,020	1 Dok	5,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	9,000,000	1 Dok	9,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	3,956,318	1 Dok	4,346,318	1 Dok	5,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	9,000,000	1 Dok	9,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	4,067,020	1 Lap	4,457,020	1 Lap	5,000,000	1 Lap	7,000,000	1 Lap	9,000,000	1 Lap	9,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	4 Keg	4 Keg	117,927,723	2 Keg	83,284,000	4 Keg	750,000,000	4 Keg	805,000,000	4 Keg	910,000,000	4 Keg	990,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	230,000,000	1 Paket	250,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	17,783,000	2 Dok	62,481,000	2 Dok	180,000,000	2 Dok	200,000,000	2 Dok	230,000,000	2 Dok	250,000,000	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dok	3 Dok	100,144,723	3 Dok	20,803,000	3 Dok	270,000,000	3 Dok	285,000,000	3 Dok	300,000,000	3 Dok	320,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	-	-	-	5 Orang	100,000,000	5 Orang	120,000,000	5 Orang	150,000,000	5 Orang	170,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Lap	6 Lap	3,353,373,738	6 Lap	1,542,569,054	6 Lap	2,730,000,000	6 Lap	2,860,000,000	6 Lap	2,990,000,000	6 Lap	3,100,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	74,189,245	1 Paket	54,193,080	1 Paket	65,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1,687,315,672	1 Paket	152,187,654	1 Paket	290,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	320,000,000	1 Paket	330,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	330,873,880	1 Paket	159,425,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	360,000,000	1 Paket	370,000,000	1 Paket	380,000,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1 Lap	948,677,961	1 Lap	960,785,320	1 Lap	1,500,000,000	1 Lap	1,550,000,000	1 Lap	1,600,000,000	1 Lap	1,650,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (laporan)	1 Dok	1 Dok	107,554,980	1 Dok	87,688,000	1 Dok	145,000,000	1 Dok	175,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	220,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	204,762,000	1 Dok	128,290,000	1 Dok	380,000,000	1 Dok	400,000,000	1 Dok	400,000,000	1 Dok	410,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	3 Lap	-	3 Lap	16,059,267	3 Lap	222,624,869	3 Lap	293,387,356	3 Lap	380,226,091	3 Lap	393,248,701	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	3 Unit	-	1 Unit	-	9 Unit	107,624,869	9 Unit	118,387,356	9 Unit	130,226,091	9 Unit	143,248,701	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	9,519,560	1 Paket	100,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30 Unit	30 Unit	-	5 Unit	6,539,707	8 Unit	15,000,000	12 Unit	25,000,000	17 Unit	50,000,000	17 Unit	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Lap	4 Lap	9,612,181,406	4 Lap	3,599,765,050	4 Lap	2,150,000,000	4 Lap	2,260,000,000	4 Lap	2,320,000,000	4 Lap	2,320,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	46,566,224	1 Lap	2,614,320	1 Lap	50,000,000	1 Lap	60,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	100,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	750,492,000	1 Lap	350,936,000	1 Lap	600,000,000	1 Lap	650,000,000	1 Lap	670,000,000	1 Lap	670,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Lap	1 Lap	5,994,730	1 Lap	5,994,730	1 Lap	7,000,000	1 Lap	14,000,000	1 Lap	25,000,000	1 Lap	25,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	8,809,128,452	1 Lap	3,240,220,000	1 Lap	1,500,000,000	1 Lap	1,550,000,000	1 Lap	1,550,000,000	1 Lap	1,550,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Lap	6 Lap	1,566,160,000	6 Lap	675,152,800	6 Lap	1,230,809,000	6 Lap	1,280,000,000	6 Lap	1,340,000,000	6 Lap	1,360,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit	3 Unit	483,424,000	3 Unit	89,103,000	3 Unit	160,809,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	31 Unit	174,344,000	17 Unit	179,560,400	17 Unit	550,000,000	17 Unit	560,000,000	17 Unit	570,000,000	17 Unit	580,000,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200 Unit	300 Unit	447,562,000	250 Unit	206,562,000	250 Unit	250,000,000	300 Unit	250,000,000	300 Unit	250,000,000	300 Unit	250,000,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	28,600,000	1 Unit	14,040,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	187,110,000	1 Unit	160,719,400	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	260,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	245,120,000	1 Unit	25,168,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI (PSTW-NP)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	100%	5,662,475,813	100%	5,273,313,000	100%	5,659,382,300	100%	6,225,320,530	100%	6,847,852,583	100%	7,532,637,841	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	126 Orang	5,662,475,813	126 Orang	5,273,313,000	126 Orang	5,659,382,300	130 Orang	6,225,320,530	130 Orang	6,847,852,583	130 Orang	7,532,637,841	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	2,753,225,100	126 Orang	3,512,424,458	126 Orang	3,863,666,904	130 Orang	4,250,033,594	130 Orang	4,675,036,954	130 Orang	5,142,540,649	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	126 Orang	134,820,000	126 Orang	880,841,170	126 Orang	968,925,287	130 Orang	1,065,817,816	130 Orang	1,172,399,597	130 Orang	1,289,639,557	
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	126 Orang	970,527,286	126 Orang	277,201,572	126 Orang	304,921,729	130 Orang	335,413,902	130 Orang	368,955,292	130 Orang	405,850,822	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-	15 Orang	11,703,530	15 Orang	6,235,690	15 Orang	6,859,259	15 Orang	7,545,185	15 Orang	8,299,703	15 Orang	9,129,674	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	61,015,000	126 Orang	105,324,798	126 Orang	115,857,278	130 Orang	127,443,006	130 Orang	140,187,306	130 Orang	154,206,037	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	579,739,200	40 Orang	181,479,389	40 Orang	199,627,328	50 Orang	219,590,061	50 Orang	241,549,067	50 Orang	265,703,973	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	1,011,737,660	40 Orang	32,822,196	40 Orang	36,104,416	50 Orang	39,714,857	50 Orang	43,686,343	50 Orang	48,054,977	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	5 Orang	1,031,737	5 Orang	21,000,000	5 Orang	23,100,000	8 Orang	25,410,000	8 Orang	27,951,000	8 Orang	30,746,100	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	5 Orang	6,000,000	5 Orang	21,000,000	5 Orang	23,100,000	8 Orang	25,410,000	8 Orang	27,951,000	8 Orang	30,746,100	
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	42,000,000	25 Orang	105,713,727	25 Orang	116,285,100	25 Orang	127,913,610	25 Orang	140,704,971	25 Orang	154,775,468	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlanta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-	10 Orang	8,400,000	10 Orang	850,000	10 Orang	935,000	10 Orang	1,028,500	15 Orang	1,131,350	15 Orang	1,244,485	
Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	126 Orang	82,276,300	126 Orang	21,420,000	126 Orang	23,562,000	130 Orang	25,918,200	130 Orang	28,510,020	130 Orang	31,361,022	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,420,000	1 Dokumen	2,662,000	1 Dokumen	2,928,200	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	-	25 Orang	-	25 Orang	105,000,000	25 Orang	115,500,000	25 Orang	127,050,000	25 Orang	139,755,000	25 Orang	153,730,500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSTW-NP)	82 %	84%	1,504,375,879	86 %	1,450,551,146	88 %	1,598,875,433	90 %	1,751,281,225	92 %	1,926,410,148	94 %	2,115,132,531	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan	1 Lap	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	1 Lap	84,348,000	1 Lap	92,782,800	1 Lap	102,061,080	1 Lap	112,267,188	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dok	4 Dok	76,680,000	4 Dok	76,680,000	4 Dok	84,348,000	4 Dok	92,782,800	4 Dok	102,061,080	4 Dok	112,267,188	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	66,560,000	1 Keg	54,768,000	1 Keg	60,244,800	1 Keg	66,269,280	1 Keg	72,896,208	1 Keg	80,185,829	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	66,560,000	1 Paket	54,768,000	1 Paket	60,244,800	1 Paket	66,269,280	1 Paket	72,896,208	1 Paket	80,185,829	
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum	4 Lap	4 Lap	361,780,110	4 Lap	200,559,734	4 Lap	228,229,880	4 Lap	243,571,117	4 Lap	267,929,028	4 Lap	290,803,299	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31,402,765	1 Paket	14,794,113	1 Paket	16,273,524	1 Paket	17,900,877	1 Paket	19,690,964	1 Paket	21,660,061	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	203,046,975	5 Paket	28,056,691	5 Paket	30,862,360	5 Paket	33,948,596	5 Paket	37,343,456	5 Paket	41,077,801	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	33,580,370	3 Paket	28,701,950	3 Paket	39,186,318	3 Paket	35,623,198	3 Paket	39,186,318	3 Paket	39,186,318	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	2 Lap	93,750,000	2 Lap	129,006,980	2 Lap	141,907,678	2 Lap	156,098,446	2 Lap	171,708,290	2 Lap	188,879,119	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lap	2 Lap	150,129,769	2 Lap	35,446,512	2 Lap	38,991,163	2 Lap	42,890,280	2 Lap	47,179,307	2 Lap	51,897,238	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	7 Paket	10 Paket	119,159,535	10 Paket	30,771,050	10 Paket	33,848,155	10 Paket	37,232,971	10 Paket	40,956,268	10 Paket	45,051,894	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7 Unit	10 Unit	30,970,234	10 Unit	4,675,462	10 Unit	5,143,008	10 Unit	5,657,309	10 Unit	6,223,040	10 Unit	6,845,344	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap	3 Lap	559,661,500	3 Lap	872,063,500	3 Lap	954,924,850	3 Lap	1,050,417,335	3 Lap	1,155,459,069	3 Lap	1,271,004,975	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4 Lap	4 Lap	-	1 Lap	3,950,000	1 Lap	4,345,000	1 Lap	4,779,500	1 Lap	5,257,450	1 Lap	5,783,195	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	336,384,700	4 Lap	292,113,500	4 Lap	321,324,850	4 Lap	353,457,335	4 Lap	388,803,069	4 Lap	427,683,375	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	223,276,800	4 Lap	576,000,000	4 Lap	633,600,000	4 Lap	696,960,000	4 Lap	766,656,000	4 Lap	843,321,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Lap	3 Lap	289,564,500	3 Lap	211,033,400	3 Lap	232,136,740	3 Lap	255,350,414	3 Lap	280,885,455	3 Lap	308,974,001	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	180,550,000	8 Unit	139,347,250	8 Unit	153,281,975	8 Unit	168,610,173	8 Unit	185,471,190	8 Unit	204,018,309	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	300 Unit	79,014,500	300 Unit	51,686,150	300 Unit	56,854,765	300 Unit	62,540,242	300 Unit	68,794,266	300 Unit	75,673,692	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	30,000,000	7 Unit	20,000,000	7 Unit	22,000,000	7 Unit	24,200,000	7 Unit	26,620,000	7 Unit	29,282,000	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	100%	3,065,306,575	100%	3,308,005,000	100%	3,742,200,256	100%	4,116,420,281	100%	4,528,062,309	100%	4,980,868,540	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	3,065,306,575	80 Orang	3,402,000,233	80 Orang	3,742,200,256	80 Orang	4,116,420,281	80 Orang	4,528,062,309	80 Orang	4,980,868,540	
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	80 Orang	19,872,000	80 Orang	21,859,200	80 Orang	24,045,120	80 Orang	26,449,632	80 Orang	29,094,595	80 Orang	32,004,055	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	771,811,180	80 Orang	848,992,298	80 Orang	933,891,528	80 Orang	1,027,280,681	80 Orang	1,130,008,749	80 Orang	1,243,009,624	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	80 Orang	123,659,290	80 Orang	136,025,219	80 Orang	149,627,741	80 Orang	164,590,515	80 Orang	181,049,566	80 Orang	199,154,523	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	9,636,470	80 Orang	10,600,117	80 Orang	11,660,129	80 Orang	12,826,142	80 Orang	14,108,756	80 Orang	15,519,631	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	62,534,770	80 Orang	68,788,247	80 Orang	75,667,072	80 Orang	83,233,779	80 Orang	91,557,157	80 Orang	100,712,872	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	80 Orang	114,000,000	80 Orang	125,400,000	80 Orang	137,940,000	80 Orang	151,734,000	80 Orang	166,907,400	80 Orang	183,598,140	
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	161,104,865	80 Orang	177,215,352	80 Orang	194,936,887	80 Orang	214,430,575	80 Orang	235,873,633	80 Orang	259,460,996	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	20 Orang	16,800,000	20 Orang	18,480,000	20 Orang	20,328,000	20 Orang	22,360,800	20 Orang	24,596,880	20 Orang	27,056,568	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	20 Orang	16,800,000	20 Orang	18,480,000	20 Orang	20,328,000	20 Orang	22,360,800	20 Orang	24,596,880	20 Orang	27,056,568	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1,737,108,000	80 Orang	1,910,818,800	80 Orang	2,101,900,680	80 Orang	2,312,090,748	80 Orang	2,543,299,823	80 Orang	2,797,629,805	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	1 Dok	17,300,000	1 Dok	19,030,000	1 Dok	20,933,000	1 Dok	23,026,300	1 Dok	25,328,930	1 Dok	27,861,823	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	-	-	10 Orang	21,100,000	10 Orang	23,210,000	10 Orang	25,531,000	10 Orang	28,084,100	10 Orang	30,892,510	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	-	-	-	1 Orang	663,000	1 Orang	729,300	1 Orang	802,230	1 Orang	882,453	1 Orang	970,698	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	5 Orang	8,400,000	5 Orang	9,240,000	5 Orang	10,164,000	5 Orang	11,180,400	5 Orang	12,298,440	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	20 Orang	6,280,000	20 Orang	6,908,000	20 Orang	7,598,800	20 Orang	8,358,680	20 Orang	9,194,548	20 Orang	10,114,003	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	20 Orang	8,400,000	20 Orang	9,240,000	20 Orang	10,164,000	20 Orang	11,180,400	20 Orang	12,298,440	20 Orang	13,528,284	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSPAD)	82 %	84%	1,905,291,425	86 %	2,390,222,471	88 %	2,305,402,468	90 %	2,535,942,715	92 %	2,789,536,986	94 %	3,068,490,685	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan	1 Lap	1 Lap	75,800,000	1 Lap	83,380,000	1 Lap	91,718,000	1 Lap	100,889,800	1 Lap	110,978,780	1 Lap	122,076,658	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	75,800,000	1 Dok	83,380,000	1 Dok	91,718,000	1 Dok	100,889,800	1 Dok	110,978,780	1 Dok	122,076,658	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	38,184,000	1 Keg	42,002,400	1 Keg	46,202,640	1 Keg	50,822,904	1 Keg	55,905,194	1 Keg	61,495,714	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	38,184,000	1 Paket	42,002,400	1 Paket	46,202,640	1 Paket	50,822,904	1 Paket	55,905,194	1 Paket	61,495,714	
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum	4 Lap	4 Lap	371,312,201	4 Lap	408,443,421	4 Lap	449,287,763	4 Lap	494,216,540	4 Lap	543,638,193	4 Lap	598,002,013	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,513,224	1 Paket	17,064,546	1 Paket	18,771,001	1 Paket	20,648,101	1 Paket	22,712,911	1 Paket	24,984,202	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	170,471,157	1 Paket	187,518,273	1 Paket	206,270,100	1 Paket	226,897,110	1 Paket	249,586,821	1 Paket	274,545,503	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,839,820	1 Paket	11,923,802	1 Paket	13,116,182	1 Paket	14,427,800	1 Paket	15,870,580	1 Paket	17,457,639	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	174,488,000	1 Lap	191,936,800	1 Lap	211,130,480	1 Lap	232,243,528	1 Lap	255,467,881	1 Lap	281,014,669	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lap	2 Lap	124,415,964	1 Lap	136,857,419	1 Lap	150,543,160	1 Lap	165,597,476	1 Lap	182,157,224	1 Lap	200,372,946	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	124,415,835	1 Paket	136,857,419	1 Paket	150,543,160	1 Paket	165,597,476	1 Paket	182,157,224	1 Paket	200,372,946	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap	3 Lap	1,013,408,921	3 Lap	1,114,749,813	3 Lap	1,226,224,794	3 Lap	1,348,847,274	3 Lap	1,483,732,001	3 Lap	1,632,105,201	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	3,372,170	1 Lap	3,709,387	1 Lap	4,080,326	1 Lap	4,488,358	1 Lap	4,937,194	1 Lap	5,430,914	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	344,756,751	1 Lap	379,232,426	1 Lap	417,155,669	1 Lap	458,871,236	1 Lap	504,758,359	1 Lap	555,234,195	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	665,280,000	1 Lap	731,808,000	1 Lap	804,988,800	1 Lap	885,487,680	1 Lap	974,036,448	1 Lap	1,071,440,093	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Lap	3 Lap	282,170,339	3 Lap	310,387,373	3 Lap	341,426,110	3 Lap	375,568,721	3 Lap	413,125,593	3 Lap	454,438,153	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	194,989,250	9 Unit	214,488,175	9 Unit	235,936,993	9 Unit	259,530,692	9 Unit	285,483,761	9 Unit	314,032,137	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	57,931,089	38 Unit	63,724,198	38 Unit	70,096,618	38 Unit	77,106,279	38 Unit	84,816,907	38 Unit	93,298,598	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	29,250,000	23 Unit	32,175,000	23 Unit	35,392,500	23 Unit	38,931,750	23 Unit	42,824,925	23 Unit	47,107,418	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	100%	4,274,803,208	100%	4,346,305,000	100%	4,475,915,282	100%	4,583,179,282	100%	4,710,188,282	100%	4,718,188,282	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 Orang	100 orang	4,274,803,208	100 orang	4,346,305,000	100 orang	4,475,915,282	100 orang	4,583,179,282	100 orang	4,710,188,282	100 orang	4,718,188,282	
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	100 Orang	5,200,000	100 Orang	7,200,000	100 Orang	7,920,000	100 Orang	8,712,000	100 Orang	9,583,000	100 Orang	9,583,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80	100 Orang	598,050,500	100 Orang	852,635,200	100 Orang	852,635,200	100 Orang	852,635,200	100 Orang	852,635,200	100 Orang	852,635,200	
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakkses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	100 Orang	450,396,397	100 Orang	260,642,214	100 Orang	296,438,000	100 Orang	326,082,000	100 Orang	358,691,000	100 Orang	358,691,000	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80	100 Orang	420,335,883	100 Orang	30,178,000	100 Orang	33,195,000	100 Orang	36,515,000	100 Orang	40,166,000	100 Orang	40,166,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80	100 Orang	160,282,109	100 Orang	102,730,020	100 Orang	118,628,000	100 Orang	130,491,000	100 Orang	143,540,000	100 Orang	143,540,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	100 Orang	12,002,175	100 Orang	45,853,724	100 Orang	50,439,000	100 Orang	55,483,000	100 Orang	61,031,000	100 Orang	63,031,000	
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80	100 Orang	288,591,144	100 Orang	389,116,760	100 Orang	414,031,000	100 Orang	455,434,000	100 Orang	500,978,000	100 Orang	500,978,000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	15 Orang	17,050,000	10 Orang	42,000,000	10 Orang	46,200,000	12 Orang	50,820,000	12 Orang	55,902,000	12 Orang	55,902,000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	25 Orang	17,050,000	12 Orang	75,600,000	13 Orang	87,780,000	12 Orang	96,558,000	12 Orang	106,213,000	12 Orang	106,213,000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80	100 Orang	2,267,790,000	100 Orang	2,400,728,082	100 Orang	2,430,728,082	100 Orang	2,435,728,082	100 Orang	2,445,728,082	100 Orang	2,450,728,082	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	1 Dokumen	31,233,000	1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	84,000,000	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	-	-	20 Orang	13,350,000	20 Orang	13,350,000	20 Orang	14,350,000	20 Orang	15,350,000	20 Orang	16,350,000	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	-	-	-	1 Orang	2,771,000	1 Orang	2,771,000	1 Orang	2,771,000	1 Orang	2,771,000	1 Orang	2,771,000	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	15 Orang	8,400,000	10 Orang	8,400,000	10 Orang	8,400,000	10 Orang	8,400,000	10 Orang	8,400,000	
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	-	-	-	2 Orang	4,200,000	2 Orang	4,200,000	2 Orang	4,200,000	2 Orang	4,200,000	2 Orang	4,200,000	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	18 Orang	2,372,000	18 Orang	18,500,000	15 Orang	16,800,000	13 Orang	12,600,000	11 Orang	12,600,000	13 Orang	12,600,000	
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	3 Orang	4,450,000	3 Orang	8,400,000	3 Orang	8,400,000	3 Orang	8,400,000	3 Orang	8,400,000	3 Orang	8,400,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSAAH)	82 %	84 %	1,756,671,539	86 %	1,756,671,539	88 %	2,580,145,100	90 %	2,734,526,200	92 %	2,927,945,870	94 %	2,937,945,870	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan	1 Lap	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	1 Lap	76,680,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	76,680,000	1 Dok	76,680,000	1 Dok	76,680,000	1 Dok	76,680,000	1 Dok	76,680,000	1 Dok	76,680,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	-	1 Keg	44,988,000	1 Keg	74,992,500	1 Keg	82,491,000	1 Keg	90,740,000	1 Keg	90,740,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	44,988,000	1 Paket	74,992,500	1 Paket	82,491,000	1 Paket	90,740,000	1 Paket	90,740,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum	4 Lap	4 Lap	608,301,203	4 Lap	334,143,329	4 Lap	681,228,600	4 Lap	749,351,000	4 Lap	824,287,000	4 Lap	824,287,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	1 Paket	32,876,957	1 Paket	13,003,039	1 Paket	24,646,000	1 Paket	27,111,000	1 Paket	29,822,000	1 Paket	29,822,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	483,946,046	1 Paket	58,381,470	1 Paket	306,289,000	1 Paket	336,918,000	1 Paket	370,610,000	1 Paket	370,610,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21,302,200	1 Paket	20,645,820	1 Paket	39,658,000	1 Paket	43,623,000	1 Paket	47,986,000	1 Paket	47,986,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	70,176,000	1 Lap	242,113,000	1 Lap	310,635,600	1 Lap	341,699,000	1 Lap	375,869,000	1 Lap	375,869,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	2 Lap	7,475,228	1 Lap	0	2 Lap	172,095,000	1 Lap	189,305,000	1 Lap	208,236,000	1 Lap	208,236,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6,123,228	1 Paket	-	1 Paket	172,095,000	1 Paket	189,305,000	1 Paket	208,236,000	1 Paket	208,236,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 lap	4 lap	775,966,608	4 lap	1,086,748,710	4 lap	1,287,204,000	4 lap	1,319,960,000	4 lap	1,379,589,000	4 lap	1,379,589,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	6,874,808	1 Lap	9,280,000	1 Lap	10,511,000	1 Lap	11,562,000	1 Lap	12,719,000	1 Lap	12,719,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	239,740,800	1 Lap	166,810,800	1 Lap	203,672,000	1 Lap	224,039,000	1 Lap	246,443,000	1 Lap	246,443,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	112,831,000	1 Lap	101,497,910	1 Lap	113,381,000	1 Lap	124,719,000	1 Lap	137,191,000	1 Lap	137,191,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	416,520,000	1 Lap	809,160,000	1 Lap	959,640,000	1 Lap	959,640,000	1 Lap	983,236,000	1 Lap	983,236,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Lap	3 Lap	288,248,500	3 Lap	214,111,500	3 Lap	287,945,000	3 Lap	316,739,200	3 Lap	348,413,870	3 Lap	358,413,870	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	224,880,000	9 Unit	193,230,000	9 Unit	223,685,000	9 Unit	246,053,000	9 Unit	270,658,850	9 Unit	280,658,850	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	28 Unit	24,370,000	37 Unit	12,530,000	48 Unit	21,362,000	48 Unit	23,498,200	45 Unit	25,848,020	45 Unit	25,848,020	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	38,998,500	9 Unit	8,351,500	9 Unit	42,898,000	9 Unit	47,188,000	9 Unit	51,907,000	9 Unit	51,907,000	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	100%	3,639,838,640	100%	4,327,437,000	100%	4,760,180,700	100%	4,855,384,314	100%	4,952,492,000	100%	5,200,116,600	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 orang	85 Orang	3,639,838,640	105 Orang	4,327,437,000	105 Orang	4,760,180,700	105 Orang	4,855,384,314	105 Orang	4,952,492,000	105 Orang	5,200,116,600	
Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	-	85 Orang	30,333,000	105 Orang	34,944,101	105 Orang	38,438,511	105 Orang	39,207,281	105 Orang	39,991,427	105 Orang	41,990,998	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	85 Orang	570,088,630	105 Orang	783,880,395	105 Orang	862,268,435	105 Orang	879,513,803	105 Orang	897,104,079	105 Orang	941,959,283	
Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	85 Orang	375,634,530	105 Orang	201,989,318	105 Orang	222,188,250	105 Orang	226,632,015	105 Orang	231,164,655	105 Orang	242,722,888	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	85 Orang	32,900,000	105 Orang	50,396,000	105 Orang	55,435,600	105 Orang	56,544,312	105 Orang	57,675,198	105 Orang	60,558,958	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	85 Orang	384,169,630	105 Orang	568,118,170	105 Orang	624,929,987	105 Orang	637,428,587	105 Orang	650,177,158	105 Orang	682,686,016	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	85 Orang	745,568,630	105 Orang	898,361,605	105 Orang	988,197,766	105 Orang	1,007,961,721	105 Orang	1,028,120,955	105 Orang	1,079,527,003	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	3 Orang	4,717,000	10 Orang	4,424,400	10 Orang	4,866,840	10 Orang	4,964,177	10 Orang	5,063,460	10 Orang	5,316,633	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	40 Orang	1,611,690	40 Orang	12,479,000	40 Orang	13,726,900	40 Orang	14,001,438	40 Orang	14,281,467	40 Orang	14,995,540	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	10 Orang	21,000,000	15 Orang	21,112,200	15 Orang	23,223,420	15 Orang	23,687,888	15 Orang	24,161,646	15 Orang	25,369,728	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	85 Orang	21,400,000	105 Orang	33,768,300	105 Orang	37,145,130	105 Orang	37,888,033	105 Orang	38,645,793	105 Orang	40,578,083	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	105 Orang	85 Orang	1,452,415,530	105 Orang	1,598,307,890	105 Orang	1,758,138,679	105 Orang	1,793,301,453	105 Orang	1,829,167,482	105 Orang	1,920,625,856	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-	-	1 Dokumen	14,848,300	1 Dokumen	16,333,130	1 Dokumen	16,659,793	1 Dokumen	16,992,988	1 Dokumen	17,842,638	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	-	-	24 Orang	28,808,300	24 Orang	31,689,130	24 Orang	32,322,913	24 Orang	32,969,371	24 Orang	34,617,839	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	-	-	-	1 Orang	3,533,249	1 Orang	3,886,574	1 Orang	3,964,305	1 Orang	4,043,591	1 Orang	4,245,771	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	105 Orang	16,464,400	105 Orang	18,110,840	105 Orang	18,473,057	105 Orang	18,842,518	105 Orang	19,784,644	
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	-	-	-	45 Orang	51,660,000	45 Orang	56,826,000	45 Orang	57,962,520	45 Orang	59,121,770	45 Orang	62,077,859	
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	45 Orang	4,341,372	45 Orang	4,775,509	45 Orang	4,871,019	45 Orang	4,968,440	45 Orang	5,216,862	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBR)	82 %	84 %	1,685,534,012	86 %	1,679,479,502	88%	1,847,427,452	90%	1,884,376,001	92%	1,922,063,521	94%	2,018,166,697	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan	1 Lap	1 Lap	76,680,000	1 Lap	84,840,000	1 Lap	93,324,000	1 Lap	95,190,480	1 Lap	97,094,290	1 Lap	101,949,004	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	76,680,000	1 Dokumen	84,840,000	1 Dokumen	93,324,000	1 Dokumen	95,190,480	1 Dokumen	97,094,290	1 Dokumen	101,949,004	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	0	1 Keg	14,688,000	1 Keg	16,156,800	1 Keg	16,479,936	1 Keg	16,809,535	1 Keg	17,650,011	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	14,688,000	1 Paket	16,156,800	1 Paket	16,479,936	1 Paket	16,809,535	1 Paket	17,650,011	
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum	4 Lap	4 Lap	355,652,766	4 Lap	348,070,602	4 Lap	382,877,662	4 Lap	390,535,215	4 Lap	398,345,920	4 Lap	418,263,216	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47,145,602	1 Paket	36,154,875	1 Paket	39,770,363	1 Paket	40,565,770	1 Paket	41,377,085	1 Paket	43,445,939	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	191,331,689	1 Paket	88,789,109	1 Paket	97,668,020	1 Paket	99,621,380	1 Paket	101,613,808	1 Paket	106,694,498	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,575,475	1 Paket	17,566,618	1 Paket	19,323,280	1 Paket	19,709,745	1 Paket	20,103,940	1 Paket	21,109,137	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	101,600,000	1 Laporan	205,560,000	1 Laporan	226,116,000	1 Laporan	230,638,320	1 Laporan	235,251,086	1 Laporan	247,013,641	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Lap	1,546,346	1 Lap	520,000	1 Lap	572,000	1 Lap	583,440	1 Lap	595,109	1 Lap	624,864	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 Unit	1,546,346	1 Unit	520,000	1 Unit	572,000	1 Unit	583,440	1 Unit	595,109	1 Unit	624,864	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	3 Lap	883,651,210	3 Lap	971,360,900	3 Lap	1,068,496,990	3 Lap	1,089,866,930	3 Lap	1,111,664,268	3 Lap	1,167,247,482	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Laporan	9,956,000	1 Laporan	10,440,000	1 Laporan	11,484,000	1 Laporan	11,713,680	1 Laporan	11,947,954	1 Laporan	12,545,351	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	204,828,610	1 Laporan	216,320,900	1 Laporan	237,952,990	1 Laporan	242,712,050	1 Laporan	247,566,291	1 Laporan	259,944,605	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Laporan	668,866,600	1 Laporan	744,600,000	1 Laporan	819,060,000	1 Laporan	835,441,200	1 Laporan	852,150,024	1 Laporan	894,757,525	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Lap	4 Lap	368,003,690	4 Lap	260,000,000	4 Lap	286,000,000	4 Lap	291,720,000	4 Lap	297,554,400	4 Lap	312,432,120	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	7 Unit	105,320,290	10 Unit	136,952,560	10 Unit	150,647,816	10 Unit	153,660,772	10 Unit	156,733,988	10 Unit	164,570,687	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	69,747,400	50 Unit	66,518,508	50 Unit	73,170,359	50 Unit	74,633,766	50 Unit	76,126,441	50 Unit	79,932,763	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	192,390,000	2 Unit	31,236,400	2 Unit	34,360,040	2 Unit	35,047,241	2 Unit	35,748,186	2 Unit	37,535,595	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	546,000	1 Unit	25,292,532	1 Unit	27,821,785	1 Unit	28,378,221	1 Unit	28,945,785	1 Unit	30,393,075	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL (PSRTS)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	100%	2,025,853,123	100%	2,501,994,000	100%	2,763,078,697	100%	3,045,882,068	100%	3,350,470,275	100%	3,685,517,301	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (UPTD PRSTS)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PRSTS)	154 Orang	60 orang	2,025,853,123	100 orang	2,501,994,000	100 orang	2,763,078,697	100 orang	3,045,882,068	100 orang	3,350,470,275	100 orang	3,685,517,301	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	1,416,613,700	100 orang	1,149,930,000	100 orang	1,264,923,000	100 orang	1,391,415,300	100 orang	1,530,556,830	100 orang	1,683,612,513	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	235,083,070	100 orang	291,323,853	100 orang	320,456,238	100 orang	352,501,862	100 orang	387,752,048	100 orang	426,527,253	
Penyediaan Wisma yang mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	60 orang	31,268,700	100 orang	190,825,945	100 orang	219,449,837	100 orang	241,394,821	100 orang	265,534,303	100 orang	292,087,733	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	8,870,328	100 orang	22,314,779	100 orang	24,546,257	100 orang	27,000,883	100 orang	29,700,971	100 orang	32,671,068	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	82,880,000	60 orang	125,784,826	60 orang	138,363,309	60 orang	152,199,640	60 orang	167,419,604	60 orang	184,161,564	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Kehidupan Sehari - hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	21,355,325	100 orang	49,500,000	100 orang	54,450,000	100 orang	59,895,000	100 orang	65,884,500	100 orang	72,472,950	
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	40 orang	194,162,000	50 Orang	176,422,348	50 Orang	194,064,583	50 Orang	213,471,041	50 Orang	234,818,145	50 Orang	258,299,960	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	60 orang	10,200,000	100 Orang	6,800,000	100 Orang	7,480,000	100 Orang	8,976,000	100 Orang	9,873,600	100 Orang	10,860,960	
Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	35 Orang	60 orang	24,910,000	45 Orang	53,000,000	45 Orang	58,300,000	45 Orang	64,130,000	45 Orang	70,543,000	45 Orang	77,597,300	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	-	45 Orang	14,160,000	45 Orang	15,576,000	45 Orang	17,133,600	45 Orang	18,846,960	45 Orang	20,731,656	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	-	-	-	10 Orang	5,950,000	10 Orang	6,545,000	10 Orang	7,199,500	10 Orang	7,919,450	10 Orang	8,711,395	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	60 Orang	52,250,000	60 Orang	57,475,000	60 Orang	68,970,000	60 Orang	75,867,000	60 Orang	83,453,700	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	60 Orang	26,880,000	60 Orang	30,912,000	60 Orang	34,003,200	60 Orang	37,403,520	60 Orang	41,143,872	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	45 Orang	332,256,000	45 Orang	365,481,600	45 Orang	402,029,760	45 Orang	442,232,736	45 Orang	486,456,010	
Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	-	-	-	3 Orang	4,596,249	3 Orang	5,055,874	3 Orang	5,561,461	3 Orang	6,117,607	3 Orang	6,729,368	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian (UPTD PSRTS)	82 %	84 %	1,211,354,077	86 %	1,308,951,505	88 %	1,439,846,656	90 %	1,583,831,322	92 %	1,742,214,454	94%	1,916,435,900	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut														
			100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan	1 Lap	1 Lap	33,360,000	1 Lap	67,560,000	1 Lap	74,316,000	1 Lap	81,747,600	1 Lap	89,922,360	1 Lap	98,914,596	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	33,360,000	1 Dokumen	67,560,000	1 Dokumen	74,316,000	1 Dokumen	81,747,600	1 Dokumen	89,922,360	1 Dokumen	98,914,596	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	32,935,800	1 Keg	36,853,858	1 Keg	40,539,244	1 Keg	44,593,168	1 Keg	49,052,485	1 Keg	53,957,733	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	32,935,800	1 Paket	36,853,858	1 Paket	40,539,244	1 Paket	44,593,168	1 Paket	49,052,485	1 Paket	53,957,733	
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum	4 Lap	4 Lap	183,865,427	4 Lap	255,492,901	4 Lap	281,042,191	4 Lap	309,146,410	4 Lap	340,061,051	4 Lap	374,067,157	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,777,456	1 Paket	4,968,131	1 Paket	5,464,944	1 Paket	6,011,438	1 Paket	6,612,582	1 Paket	7,273,840	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	103,447,859	1 Paket	88,246,791	1 Paket	97,071,470	1 Paket	106,778,617	1 Paket	117,456,479	1 Paket	129,202,127	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,558,192	1 Paket	2,952,543	1 Paket	3,247,797	1 Paket	3,572,577	1 Paket	3,929,835	1 Paket	4,322,818	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan_Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Laporan	73,081,920	1 Laporan	159,325,436	1 Laporan	175,257,980	1 Laporan	192,783,778	1 Laporan	212,062,156	1 Laporan	233,268,372	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	2 Lap	722,437,600	2 Lap	699,030,400	2 Lap	768,933,440	2 Lap	845,826,784	2 Lap	930,409,462	2 Lap	1,023,450,408	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	104,737,600	1 Laporan	124,950,400	1 Laporan	137,445,440	1 Laporan	151,189,984	1 Laporan	166,308,982	1 Laporan	182,939,880	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	617,700,000	1 Laporan	574,080,000	1 Laporan	631,488,000	1 Laporan	694,636,800	1 Laporan	764,100,480	1 Laporan	840,510,528	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	3 Lap	238,755,250	3 Lap	250,014,346	3 Lap	275,015,781	3 Lap	302,517,359	3 Lap	332,769,096	3 Lap	366,046,006	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	7 Unit	98,229,750	7 Unit	83,540,350	7 Unit	91,894,385	7 Unit	101,083,824	7 Unit	111,192,206	7 Unit	122,311,427	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	67,142,000	20 Unit	72,922,000	20 Unit	80,214,200	20 Unit	88,235,620	20 Unit	97,059,182	20 Unit	106,765,100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	73,383,500	1 Unit	93,551,996	1 Unit	102,907,196	1 Unit	113,197,916	1 Unit	124,517,708	1 Unit	136,969,479	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ODAH BERSAMA (PSRSPD)															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PRSPD ODAH BERSAMA)	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	100%	1,790,828,330	100%	2,886,858,241	100%	3,872,704,513	100%	4,957,061,777	100%	6,345,039,074	100%	8,121,650,015	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (UPTD PRSPD ODAH BERSAMA)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PRSPD ODAH BERSAMA)	30 Orang	50 Orang	1,790,828,330	80 Orang	2,886,858,241	100 Orang	3,872,704,513	120 Orang	4,957,061,777	140 Orang	6,345,039,074	160 Orang	8,121,650,015	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	50 Orang	1,193,309,530	80 Orang	1,939,087,460	100 Orang	2,482,031,949	120 Orang	3,177,000,894	140 Orang	4,066,561,145	160 Orang	5,205,198,265	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	50 Orang	245,096,750	80 Orang	314,419,318	100 Orang	402,456,727	120 Orang	515,144,611	140 Orang	659,385,102	160 Orang	844,012,930	
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	20 Orang	26,905,800	80 Orang	31,594,932	100 Orang	40,441,513	120 Orang	51,765,137	140 Orang	66,259,375	160 Orang	84,812,000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-	1 Orang	2,450,760	10 Orang	13,608,160	5 Orang	8,709,222	5 Orang	11,147,805	5 Orang	14,269,190	5 Orang	18,264,563	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	50 Orang	22,822,215	80 Orang	27,054,248	100 Orang	34,629,437	120 Orang	44,325,680	140 Orang	56,736,870	160 Orang	72,623,194	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	50 Orang	130,800,000	80 Orang	14,400,000	100 Orang	18,432,000	120 Orang	23,592,960	140 Orang	30,198,989	160 Orang	38,654,706	
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	50 Orang	94,785,000	80 Orang	102,641,792	100 Orang	131,381,494	120 Orang	168,168,312	140 Orang	215,255,439	160 Orang	275,526,962	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	-	10 Orang	1,700,000	2 Orang	340,000	3 Orang	435,200	4 Orang	557,056	5 Orang	713,032	6 Orang	912,681	
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	50 Orang	8,500,000	80 Orang	8,160,000	100 Orang	10,444,800	120 Orang	13,369,344	140 Orang	17,112,760	160 Orang	21,904,333	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	10 Orang	42,000,000	10 Orang	42,000,000	10 Orang	53,760,000	10 Orang	68,812,800	10 Orang	88,080,384	10 Orang	112,742,892	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	2 Orang	12,600,000	2 Orang	16,800,000	4 Orang	21,504,000	4 Orang	27,525,120	4 Orang	35,232,154	4 Orang	45,097,157	
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	-	-	-	10 Kab / Kota	42,000,000	10 Kab / Kota	53,760,000	10 Kab / Kota	68,812,800	10 Kab / Kota	88,080,384	10 Kab / Kota	112,742,892	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	10 Orang	42,000,000	10 Orang	53,760,000	10 Orang	68,812,800	10 Orang	88,080,384	10 Orang	112,742,892	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	-	-	-	20 Orang	3,400,000	20 Orang	4,352,000	20 Orang	5,570,560	20 Orang	7,130,317	20 Orang	9,126,806	
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	-	-	-	2 Orang	9,192,498	2 Orang	11,766,397	2 Orang	15,060,989	2 Orang	19,278,066	2 Orang	24,675,924	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-	-	-	16 Orang	258,659,982	32 Orang	517,319,964	32 Orang	662,169,554	32 Orang	847,577,029	32 Orang	1,084,898,597	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	-	1 Dokumen	9,858,275	2 Dokumen	21,499,851	2 Dokumen	27,519,809	2 Dokumen	35,225,356	2 Dokumen	45,088,456	2 Dokumen	57,713,223	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD. PRSPD Odah Bersama)	-	-	-	86%	2,772,629,428	88%	4,092,098,951	90%	4,502,308,846	92%	4,952,539,730	94%	5,447,793,704	
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	-	-	100 %		100 %		100 %		100 %				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	-	-	-	2 Lap	281,654,428	6 Lap	449,012,951	6 Lap	493,914,246	6 Lap	543,305,670	6 Lap	597,636,238	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1 Paket	64,193,080	1 Paket	70,612,388	1 Paket	77,673,627	1 Paket	85,440,989	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1 Paket	111,014,428	1 Paket	122,115,871	1 Paket	134,327,458	1 Paket	147,760,204	1 Paket	162,536,224	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,100,000	1 Paket	13,310,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	-	-	-	1 Lap	170,640,000	1 Lap	187,704,000	1 Lap	206,474,400	1 Lap	227,121,840	1 Lap	249,834,024	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (laporan)	-	-	-	-	-	1 Dok	35,000,000	1 Dok	38,500,000	1 Dok	42,350,000	1 Dok	46,585,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dok	30,000,000	1 Dok	33,000,000	1 Dok	36,300,000	1 Dok	39,930,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2 Lap	450,000,000	2 Lap	495,000,000	2 Lap	544,500,000	2 Lap	598,950,000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Pagu Indikatif Tahun												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1 Paket	200,000,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	242,000,000	1 Paket	266,200,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	5 Unit	250,000,000	5 Unit	275,000,000	5 Unit	302,500,000	5 Unit	332,750,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2 Lap	2,323,405,000	4 Lap	2,793,086,000	4 Lap	3,072,394,600	4 Lap	3,379,634,060	4 Lap	3,717,597,466	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	-	1 Lap	5,000,000	1 Lap	5,500,000	1 Lap	6,050,000	1 Lap	6,655,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	1 Lap	251,865,000	1 Lap	302,238,000	1 Lap	332,461,800	1 Lap	365,707,980	1 Lap	402,278,778	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	1 Lap	5,000,000	1 Lap	5,500,000	1 Lap	6,050,000	1 Lap	6,655,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Lap	2,071,540,000	1 Lap	2,485,848,000	1 Lap	2,734,432,800	1 Lap	3,007,876,080	1 Lap	3,308,663,688	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	-	-	-	2 Lap	167,570,000	5 Lap	400,000,000	5 Lap	441,000,000	5 Lap	485,100,000	5 Lap	533,610,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	-	-	-	2 Unit	50,000,000	3 Unit	55,000,000	3 Unit	60,500,000	3 Unit	66,550,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	-	-	-	-	2 Unit	50,000,000	2 Unit	55,000,000	2 Unit	60,500,000	2 Unit	66,550,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	1 Unit	67,570,000	6 Unit	100,000,000	300 Unit	110,000,000	6 Unit	121,000,000	6 Unit	133,100,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	1,100,000	1 Unit	1,210,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	165,000,000	1 Unit	181,500,000	1 Unit	199,650,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KET
1	Rehabilitasi Sosial	Keberfungsian sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dalam Pant	Penerapan SPM
			Rehabilitasi sosial dasar Lansia terlantar dalam Pant	
			Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam Pant	
			Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis dalam Pant	
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Berkurangnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengentasan Kemiskinan
3	Penanganan Bencana	Keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penerapan SPM

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JENIS INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dinas Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Tujuan	57.96	58.46	59.26	59.76	60.26	60.76	61.06
2	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10% Tahunan	Sasaran	12	12	10	10	10	10	10
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran	75.55	76.55	78.55	81.1	83.4	85.8	87.1
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Sasaran	82	84	85	86	87	88	89

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
4	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
5	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 merupakan upaya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Selain itu Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya Berkurangnya Kemiskinan dan Kesejangangan Kalimantan Timur yang berkelanjutan.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 disusun melalui tahapan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 maka akan menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahunan maupun 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada umumnya dan Peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada khususnya.

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan sub program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 selaku lembaga yang diberikan kewenangan bidang sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai prioritas Pembangunan Daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Sosial Prov. Kaltim dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 bersifat fleksibel dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen yang disusun melalui berbagai tahapan seperti Persiapan, Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Renstra, dan diakhiri dengan penetapan RENSTRA. Setelah RENSTRA Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Prov. Kaltim sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA Kaltim tahun 2025-2029. Setelah Proses Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RENSTRA Provinsi Kalimantan Timur, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Timur, kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel pada Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) pada Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) yang merujuk pada Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam dua atau tiga tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tiap triwulan melalui aplikasi (EVDOREN). Hal tersebut digunakan untuk Menyusun Laporan Kinerja sekaligus dijadikan instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
7. Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2025-2029 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RENSTRA Provinsi Kalimantan Timur.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada periode Renstra tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan Program/Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para stakeholder.

Samarinda, November 2025



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19680814 199403 1 012

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009